



disnakerind
TANAH LAUT
K O M P E T I T I F

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



JALAN A. SYAIRANI KOMP.
PERKANTORAN GAGAS TELP. (0512) 21165 PELAIHARI 70814



DISNAKERPERIN.TALA@GMAIL.COM



DISNAKERIND.TANAHLAUTKAB.GO.ID/

2023

TAHUN ANGGARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, Februari 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menetapkan 8 (delapan) program yang terdiri atas 19 (sembilan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.290.439.542,-** dan realisasi sebesar **Rp. 8.317.591.389,-** atau tercapai **80,83 %**. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2022 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, Februari 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

	KATA PENGANTAR	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. LATAR BELAKANG.....	1
	B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI.....	2
	C. ISU STRATGIS	11
	D. PRODUK DAN LAYANAN.....	14
	E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	15
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
	A. VISI RPJMD.....	22
	B. MISI RPJMD.....	25
	C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	27
	D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	31
	E. PERJANJIAN KINERJA 2022.....	32
	F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	47
	A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	47
	1. SASARAN RPJMD.....	47
	2. ESELON II	88
	3. ESELON III	150
	1) ESELON IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN).....	155
	2) ESELON IV (KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	158
	3) ESELON IV (KASUBBAG TATA USAHA UPT. BLK)	161
	4. ESELON III (KEPALA BIDANG P2TK)	164
	1) ESELON IV (KEPALA UPT. BLK)	171
	5. ESELON III (KEPALA BIDANG HIJSTK)	172

6. ESELON III (KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN)	177
B. KUNTABILITAS KEUANGAN.....	179
1. ANGGARAN DAN REALISASI APBD 2020	179
2. ANGGARAN DAN REALISASI MENURUT SASARAN DAN PROGRAM	179
3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN 2022	196
BAB IV PENUTUP.....	216
A. KESIMPULAN	216
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	217
LAMPIRAN :	219
1. IKU	
2. PERNYATAAN HASIL REVIU TAHUN 2022	
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
4. CASCADING/ POHON KINERJA	
5. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN (1-4)	
6. MONEV RENSTRA	
7. MATRIK KESELARASAN	



A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Tap. MPR RI No. 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPTD Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Bidang Perindustrian.
- f. UPTD Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

A. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:

D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

E. UPT Dinas; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas pokok pada Disnakerind Kabupaten Tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan manajemen dan pengendalian di bidang Tenaga Kerja, dan Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai

berikut :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, menyelenggarakan mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan kewenangannya ;
- b. Memimpin, mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian ;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pendidikan pelatihan kerja
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan pengawasan hubungan industrial dan syarat kerja
- f. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas keahlian tenaga kerja
- g. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga kerja asing
- h. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah
- i. Membuat laporan kinerja bidang perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada sekretaris daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Disnakerind Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan perencanaan program Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis Bidang tenaga kerja, dan perindustrian yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

d. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

e. pengkoordinasian perencanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian dengan instansi vertikal di daerah;

f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;

g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;

h. penyelenggaraan Kesekretariatan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- g. koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamenyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

f. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

C. ISU STRATEGIS

Ada beberapa isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian.

Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk kompetensi tenaga kerja untuk mewujudkan Program Unggulan 500 Orang Siap Kerja .

Pelatihan kerja sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian perlu mendorong terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta selain UPT BLK yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut perlu program penguatan kelembagaan, standarisasi kompetensi, peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi dalam program pemagangan.

2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dipandang sebagai proses kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya. Peningkatan pelayanan tersebut dibangun melalui pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu (SISNAKER TERPADU) sebagai kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja, pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, penerbitan ijin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) daerah Kabupaten, pengelolaan IPK (Informasi Pasar Kerja) dan pemberian tanda daftar BKK (Bursa Kerja Khusus).

Pembinaan terhadap LPTKS dan BKK perlu diintensifkan mengingat urgensi dan cakupan layanan dapat diperluas, karena BKK dapat dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sedang membahas draft Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja, diperlukan jaminan sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada para pekerja formal, tenaga kerja informal (mandiri), Perangkat Desa, tenaga non ASN (PTT) dan tenaga kerja konstruksi, berdasarkan MoU antara pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin.

4. Harmonisasi hubungan industrial melalui peningkatan jumlah penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB).

Meningkatnya jumlah sengketa atau perselisihan hubungan industrial menuntut upaya maksimal tenaga fungsional mediator HI, agar

penyelesaian perselisihan dapat dicapai melalui Perjanjian Bersama (PB) sebelum pilihan terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut belum memiliki tenaga fungsional mediator, sehingga pelayanan penanganan perselisihan HI bekerja sama dengan tenaga mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dilakukan melalui pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite, deteksi dini penanganan mogok kerja, PHK, dan penutupan perusahaan.

5. Peningkatan Industri kecil dan menengah.

Kebijakan yang berpihak kepada IKM mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, meliputi perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri daerah dilakukan melalui strategi pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas.

Pemerintah Daerah menggalakkan program penumbuhan wirausaha baru.

Dengan meningkatnya jumlah wirausaha baru, maka diharapkan juga meningkatnya jumlah IKM di Kab. Tala . tindak lanjut dari meningkatnya IKM dan jumlah perusahaan, maka jumlah IKM yang terfasilitasi TDI dan IUI juga turut bertambah.

6. Terbangunnya kawasan industri Jorong

Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Kawasan Industri Jorong masuk dalam proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi dalam pembuatan master plan dan RDTR.

7. Tumbuhnya sentra IKM.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM), berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa disetiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada didalam atau di luar Kawasan Industri. Pada Tahun 2019 melalui dana DAK telah dibangun Gedung Sentra IKM di Kecamatan Tambang Ulang.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Produk dan layanan yang dihasilkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut dalam bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang PPTK berupa :

- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1
- b. Rekomendasi Penempatan TKI ke Luar Negeri
- c. Pemberian Ijin Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)

2. Prosedur Pelayanan

a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1

1) Pencari Kerja menyerahkan persyaratan, diantaranya :

- Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai dari SD s/d Pendidikan terakhir.
- Fotocopy KTP/ keterangan domisili
- Fotocopy sertifikat keterampilan (jika ada)
- Fotocopy surat pengalaman kerja (jika ada)
- Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

2) Pencari kerja mengisi data (identitas) di buku agenda/ database pencari kerja sesuai dengan tingkat pendidikan.

3) Petugas memverifikasi berkas pencari kerja.

4) Petugas mewawancarai dan menginput/ mengentry data pencari kerja ke website resmi Kemenakertrans RI yaitu :

<http://www.infokerja.depnakertrans.go.id>

5) Petugas mengambil photo pencari kerja

6) Petugas mencetak kartu pencari kerja

7) Petugas antar kerja menandatangani kartu pencari kerja/ AK 1

8) Petugas melegalisir kartu pencari kerja yang sudah digandakan (fotocopy) oleh pencari kerja dan menyerahkan kembali kepada pencari kerja.

b. Rekomendasi Penempatan TKI ke luar negeri (SISKOTKLN)

- 1) PPTKIS dan calon TKI (CTKI) menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi :
 - CTKI harus dihadirkan
 - KTP, Ijazah, Akte kelahiran/ Surat kenal lahir, Kartu keluarga (KK)
 - Surat ijin suami/ isteri, orang tua atau wali diketahui oleh RT/ Lurah/ Kades
 - Perjanjian penempatan TKI
 - Perjanjian Kerja (PK)
- 2) Persetujuan dari Kepala Dinas
- 3) Uji Kelayakan Kebutuhan CTKI yang meliputi :
 - a. Uji baca tulis bagi yang tidak tamat SD
 - b. Skill/ keterampilan yang dimiliki
- 4) Menginput data CTKI Online melalui website resmi BNP2TKI yaitu SPPTKLN atau SISKOTKLN dengan mengakses : *HYPERLINK*
"<http://www.bnp2tki.go.id>" *<http://www.bnp2tki.go.id>* atau
<http://siskotkln.bnp2tki.go.id>
- 5) Penandatanganan rekomendasi paspor CTKI dan berita acara CTKI oleh Kepala Dinas
- 6) Penyerahan berkas.

B. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang HIJSTK berupa :

- a. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan
- c. Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama
- d. Pencatatan Pelaporan Pekerjaan Pemborongan dan Jenis Pekerjaan Penunjang
- e. Pencatatan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
- f. Pencatatan LKS Bipartit
- g. Pencatatan PHK
- h. Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

C. Bidang Perindustrian

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang Perindustrian berupa :

- a. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Fasilitasi Standarisasi Industri (IUMK OSS, Halal, Hak Kekayaan Industri)
- c. Fasilitasi Pendaftaran Program Pelatihan dan Pemberdayaan Industri yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalsel melalui aplikasi Si Manis
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan Industri melalui Program Pelatihan dan Pemagangan serta Pendampingan IKM dalam rangka mengakses Program Bantuan Permodalan melalui Gapura Karomah.

D. UPT Balai Latihan Kerja

Pelayanan publik yang diberikan oleh UPT. BLK berupa :

- a. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT. BLK.
- b. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di desa-desa dan kecamatan.
- c. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di Balai-Balai Besar Kementerian Tenaga Kerja.
- d. Menerima permintaan dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di perusahaan kerja/ kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Pemanggil peserta yang sudah mendaftar melalui via telp. dan sms.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis

- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD



C. Tujuan dan Sasaran Strategis

D. Indikator Kinerja Utama

E. Perjanjian Kinerja 2022

F. Program dan Kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas)
3. Eselon III (Sekretaris)
 - 1) Eselon IV (Kasubbag Umum)
 - 2) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
 - 3) Eselon IV (Kasubbag Tata Usaha UPT. BLK)
4. Eselon III (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja)
 - 1) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)
5. Eselon III (Kepala Bidang Hubungn Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

- 1) IKU
- 2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021
- 3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 4) Pohon Kinerja
- 5) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
- 6) Monev Renstra
- 7) Matrik Keselarasan



disnakerind

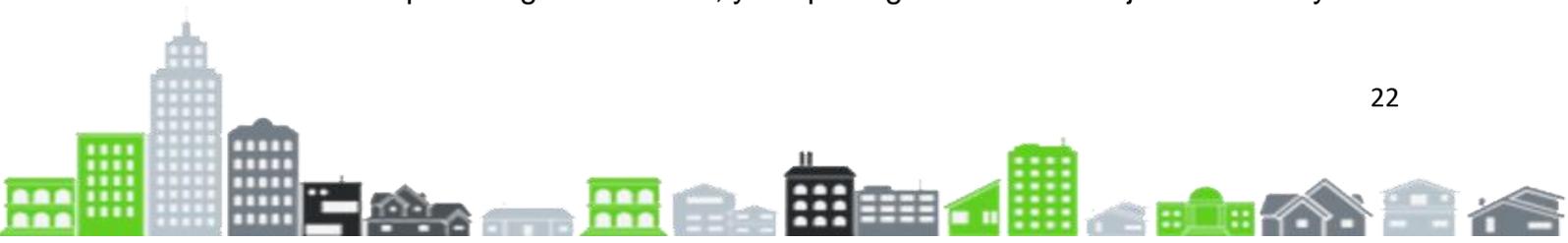
A. Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.



Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.



TERTATA

: Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

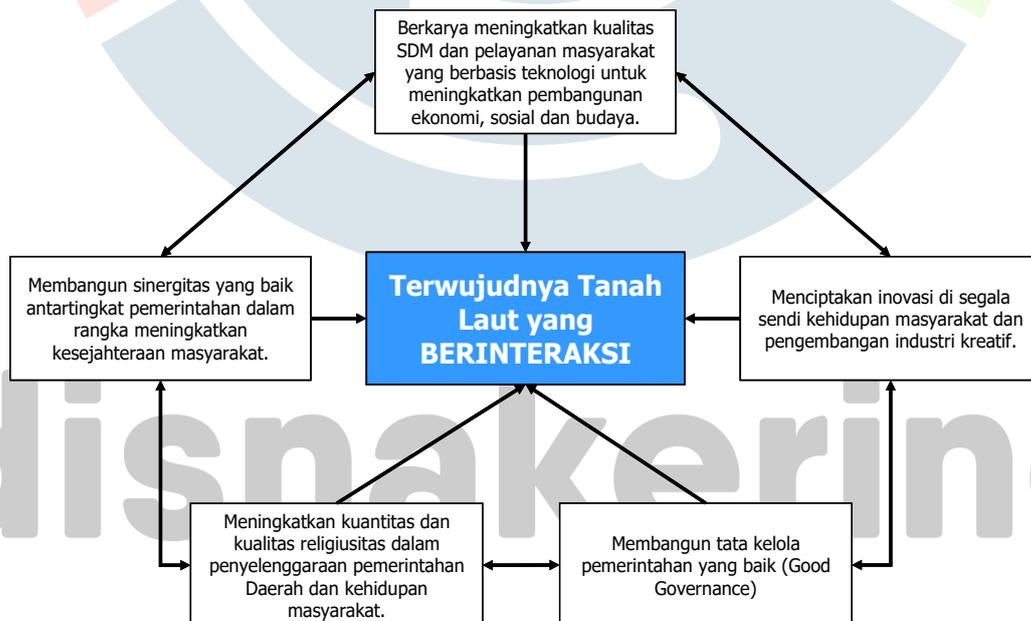
Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah

Kabupaten kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Tabel 2.1

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”.

tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya "*Sense of responsibility and professionally*" dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan

yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.
5. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keterkaitan Tujuan Renstra dengan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023:

- A. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja selaras dengan **Misi 1** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- B. Untuk Tujuan 2 dan 3 : Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial selaras dengan **Misi 5** yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Untuk Tujuan 4 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri selaras dengan **Misi 2** yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

D. Untuk Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat selaras dengan **Misi 3** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”.
2. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kesempatan Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja”.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “
4. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri”.
5. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90%	70,30%	71%	71,12%	71,90%
2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	3%	3,5%	4%	5,5%	6,5%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%
4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,50%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%
5	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (*measurable*) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 >}} \times 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Bidang PPTK/BPS
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang HJSTK
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB tahun } N - \text{PDRB tahun } N-1}{\text{PDRB Tahun } N} \times 100\%$	Bidang Perindustrian/ BPS
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretariat

E. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2022 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah

1. Kepala Dinas

Tabel 2.4

Target Indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,12 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	5,5 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	40 %
4	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,57 %
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

2. Sekretaris

Tabel 2.5

Target Indikator Kinerja Kepala Sekretaris

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	1.1 Nilai Sakip Disnakerind	A
		1.2 Nilai Reformasi Birokrasi	AA

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Akuntabel	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan	1.1 6 Dokumen
		1.2 Jumlah Laporan	1.2 2 Laporan
		1.3 Jumlah Dokumen	1.3 3 Dokumen
2	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	2.1 Jumlah Bulan	2.1 12 Bulan
		2.2 Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan	2.2 1 Dokumen & 4 Laporan

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.7

Target Indikator Kinerja Kepala Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jumlah Orang	2 Orang
2	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	94 Buah
		2 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	10 Jenis 19 Jenis dan 4 Jenis
		3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
		4 Jumlah jenis cetak dan penggandaan	67778 Lembar
		5 Jumlah jenis Percetakan	50 Buku
		6 Jumlah Jenis Bahan bacaan	1 Jenis
		7 Jumlah jenis fasilitas	3 Jenis
		8 Jumlah Tamu yang difasilitasi	316 Tamu
		9 Jumlah Lokasi perjalanan dinas	11 Jenis
		10 Jumlah Perjalanan Dinas	150 Orang
3	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Meubel	1 Jenis
		2 Jumlah Sarpras Gd Kantor	3 Jenis
4	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik	3 Jenis
		2 Jumlah Unit	20 Unit
		3 Pemeliharaan Sistem Informasi	6 Jenis
		4 Jumlah alat kebersihan	373 Buah
		5 Jumlah Dokumen TU BMD	2 Dokumen
		6 Jumlah PTT	18 Orang
		7 Jumlah TA	2 Orang
5	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	1 Jumlah Kendaraan dinas Roda 2	8 Unit
		2 Jumlah Kendaraan dinas Roda 4	2 Unit
		3 Jumlah Jenis Barang	4 Jenis

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
		4 Jumlah Peralatan mesin	4 Unit
		5 Jumlah jenis	12 Jenis
		6 Jumlah Material bangunan	302 Buah
		7 Jumlah Orang	7 Orang
		8 Jumlah jenis	1 Jenis
		9 Jumlah kegiatan	1 Kegiatan

5. Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tabel 2.8

Target Indikator Kinerja Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	30 %

6. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 2.9

Target Indikator Kinerja Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	Persentase peserta latih yang berkompoten	32,90%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	13,39%

7. Kabid Perindustrian

Tabel 2.10

Target Indikator Kinerja Kabid Perindustrian

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	100 %
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	60 %

8. Kepala UPT. BLK

Tabel 2.11

Target Indikator Kinerja Kepala UPT BLK

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	500 Orang

9. Kasubbag Tata Usaha UPT BLK

Tabel 2.12

Target Indikator Kinerja Kasubbag TU UPT BLK

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Jenis Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	2.1 4 Jenis
		1.2 Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan	2.2 11 Jenis
		1.3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2.3 2 Jenis
		1.4 Jumlah Tamu	2.4 160 Orang
		1.5 Jumlah Orang Yang Melakukan Perjalanan Dinas	2.5 50 Orang

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	2.1 Jumlah Mebeleur	2.1 1 Jenis
		2.2 Jumlah Perlengkapan	2.2 1 Jenis
3	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3.1 Jumlah Jenis Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	3.1 6 Jenis
		3.2 Jumlah Dokumen TU BMD	3.2 1 Dokumen
		3.3 Jumlah Jenis	3.3 1 Jenis
		3.4 Jumlah PPT	3.4 6 Orang
		3.5 Jumlah Surat Masuk Dan Keluar	3.5 150 Surat
		3.6 Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3.6 4 Jenis
4	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	4.1 Jumlah Jasa/Unit Pemeliharaan Dan Perizinan	4.1 1 Unit
		4.2 Jumlah Jenis Peralatan Kerja	4.2 4 Jenis
		4.3 Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	4.3 1 Buah
		4.4 Jumlah Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gd Kantor	4.4 12 Jenis



F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

Tabel 2.13

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17.585.433,00
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.585.433,00
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433,00
B	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	120.333.024,00
1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.029.876,00
1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876,00
2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.813.148,00
1	Pelayanan antar Kerja	51.393.481,00
2	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152,00
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.406.515,00
3	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.490.000,00
1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	59.916.340,00
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	41.003.748,00
1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542,00
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	9.997.986,00
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00
3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648,00
1	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.930.648,00
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48.085.000,00
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.735.000,00
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000,00
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000,00
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00
1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00
Jumlah		245.919.797

B. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

disnakerind

Tabel 2.14

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338.997.997,00
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.997.997,00
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498,00
3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	39.405.000,00
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999,00
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	69.598.532,00
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.598.532,00
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	69.598.532,00
Jumlah		103.496.629,00

Tabel 2.15

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan Dinas

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.959.187.536,00
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.954.528,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.991.282,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.042.895,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.087.910,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.134.875,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.217.566,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.466.538,00
1	Pengadaan Mebel	14.756.225,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.710.313,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.842.561,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.216.513,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000,00



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.511.048,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.920.995,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.000,00
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.671,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415,00
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.786.802.243,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225,00
		8.959.187.536,00

disnakerind



Tabel 2.16

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan UPT BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.966.676,00
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.966.676,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.273.210,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.690,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.925.520,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.492.600,00
1	Pengadaan Mebel	8.360.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.132.600,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.478.505,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.794.725,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.776.380,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.907.400,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.972.665,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.344.760,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.977.905,00
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	299.629.700,00
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	299.629.700,00
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	299.629.700,00
Jumlah		664.846.680,00

disnakerind

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Target dan capaian Sasaran RPJMD yang diampu oleh Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran RPJMD Yang Diampu Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0	3,52	113%	2,6	4,17	113%
2	Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil Menengah (Ikm) Yang Mengembangkan Inovasi Dan Kreativitas Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (Ikm) Yang Mengembangkan Inovasi Dan Kreativitas Industri	15 Unit Usaha	103 Unit Usaha	686,67 %	20 Unit Usaha	134 Unit Usaha	670 %

A. Penjelasan Tentang Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Merujuk pada *Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024* pada Bab 5, TPT menunjukkan kemampuan ekonomi

untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi



ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun 2022 sebesar 4,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Pada tahun 2022, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,52 persen. Jika kita perhatikan capaian 4,17 persen ini di bawah angka target yang diharapkan oleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 yaitu 2,6 persen. Namun di sisi lain, angka TPT kabupaten Tanah Laut masih di bawah angka TPT Provinsi Kal-Sel yaitu 4,74 persen.

Kenaikan TPT sebesar 0,65 persen ini, jika kita perhatikan bahwa di saat perekonomian masih dalam tahap pemulihan akibat adanya pandemic Covid-19, ternyata faktor cuaca yang tidak menentu pada tahun 2022 memberikan dampak yang besar pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Faktor cuaca yang tidak menentu ini akibat dampak dinamika atmosfer dan laut serta prakiraan El Nino Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), monsoon dan suhu permukaan laut (SST). Kondisi cuaca ini menjadi penyebab terjadinya kegagalan panen padi palawija dan penurunan produksi perikanan, baik perikanan darat maupun laut. Sementara mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut bekerja di Sektor Pertanian yaitu sebesar 49,52 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian dalam upaya menekan angka Tingkat Pengangguran

Terbuka, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya perluasan kesempatan kerja melalui dukungan terhadap berbagai program yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui SKPD yang terkait dengan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani dan Nelayan di Kabupaten Tanah Laut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,17 persen pada tahun 2022 menggambarkan masih diperlukannya peran Pemerintah Daerah untuk mengayomi masyarakat. Lebih lanjut seperti dipaparkan pada *Bab 1 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024*, Peluang dan tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun-tahun ke depan akan semakin kompleks dimana Kabupaten Tanah Laut akan menghadapi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu :

1. **Pasca pandemi COVID-19.** Secara global pandemi Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020 dan terasa dampaknya hingga sekarang ini diberbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor kependudukan dan lain-lain.
2. **Bonus demografi penduduk** yang dimulai pada tahun 2025 dan akan mengalami masa puncak pada tahun 2030. Bonus demografi ini menggambarkan pertambahan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
3. **Era digital 4.0**, atau revolusi industri keempat yang menggambarkan dimana era dominasi mesin-mesin berteknologi canggih (komputerisasi) yang akan bersaing dengan tenaga kerja manusia.

- 
4. *Era society 5.0*, yang menggambarkan era inovasi teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Bab 6 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024 disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu menyusun perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis diatas. Pembinaan ketenagakerjaan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, sehingga tidak tepat jika ada anggapan bahwa pembinaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengandalkan suatu kebijakan tunggal dan tidak mungkin apabila tanggungjawabnya hanya diletakkan pada satu atau beberapa instansi saja.

Pada tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dan luas sehingga bersifat multi dimensial antar berbagai sektor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politis dan sebagainya, oleh sebab itu pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4, Visi, Misi, dan 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati serta tantangan dan permasalahan sektor ketenagakerjaan pada saat ini dan di masa depan maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat**



Pengangguran Terbuka (TPT) secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

disnakerind

1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu :

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Pengadaan Listrik dan Gas;
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- f. Konstruksi;
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- h. Transportasi dan Pergudangan;
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- j. Informasi dan Komunikasi;
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- l. Real Estate;
- m. Jasa Perusahaan;
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- o. Jasa Pendidikan;
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- q. Jasa Lainnya.

2) Sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan

- 3) Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyanggah status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja. Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja, penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:

- 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
- 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
- 3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
- 4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
- 5) Memfungsikan pasar tenaga kerja.

Kebijakan umum pengendalian penduduk, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.

Kebijakan umum Investasi, dimana kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
2. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
3. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
4. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
6. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
7. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
8. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
9. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana

baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;

10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
11. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
13. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
14. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.

Semakin meningkatnya indikator-indikator di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap

B. Penjelasan Tentang Industri Kecil Menengah (IKM) Yang Mengembangkan Inovasi Dan Kreativitas Industri.

Industri Kecil dan Menengah yang mengembangkan inovasi semakin bertambah seiring dengan adanya fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut. Adapun pendampingan dan fasilitasi yang diberikan antara lain Fasilitasi Halal, Hak Merek dan bantuan desain kemasan dimana fasilitasi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk IKM di pasaran.

Tabel 3.2
Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri di Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam – Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari
7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong
8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
13	IKM EI Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM EI Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM EI Banjarie Eksklusive	Pelaihari

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung
19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban,	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
					Kec. Pelaihari			
24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
25	IKM LuwesCollection	Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
			26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
			27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari	28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
			29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
			30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari	30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari
			31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec.	33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
					Tambang Ulang			
			34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang	34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
			35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
			36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap	36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
			37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin
			38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong	39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
			40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
			43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari	43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong	44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong
			45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari	45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari
			46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin	47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin
			48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan
			49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
			50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin	50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin
			51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
			52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
			54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur,	54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
					Kec. Takisung			
			55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
			56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari	56	IKM Kreanov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari
			57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang	57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
			58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap	58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap
			59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong	59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong
			60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
			61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung	61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
			62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung	62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
			63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung,	63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
					Kec. Bati-Bati			
			64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur	64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur
			65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang	65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang
			66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur	66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur
			67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
			68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati	68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
			69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati	69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati
			70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung	70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung
			71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung	71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung
			72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung	73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung
			74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung	74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung
			75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Jawa, Kecamatan Pelaihari	75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari
			76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung	76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung
			77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung	77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
			78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung	78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung
			79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari	79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari
			80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung	80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung
			81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknilk	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar	81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar
			82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin	83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
			84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
			85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari	85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari
			86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari
			87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
			88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
			90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
			91	IKM Sahabat Madu	Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung	91	IKM Madu Hasan Al Zahra	Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari
			92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari	93	IKM Keripik Jamur SYYFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
			94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
			95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
			96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
			97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati	97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati
			98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan	98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan
			99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung	99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung
			100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
			101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari	101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari
			102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung	102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung
			103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						104	Kelompok Sumber Rezeki Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur

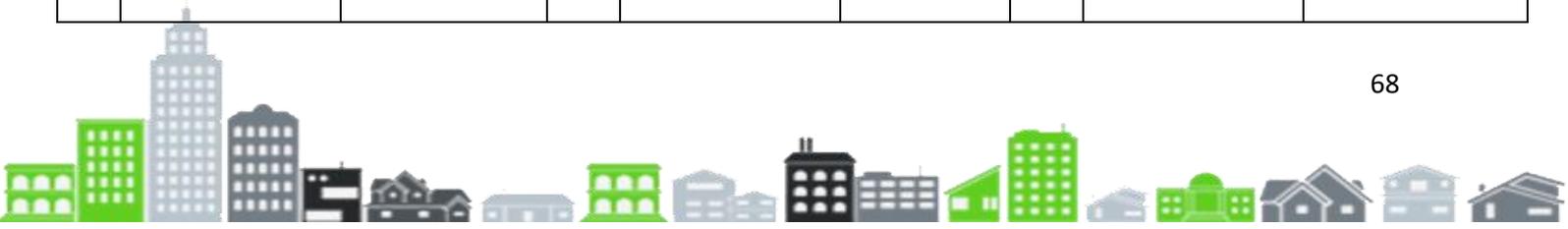


Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
						105	Kelompok Kenanga Terasi	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						106	Kelompok Berkah Mangrove Sirup dan Selai	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						107	Kelompok Kayuh Baimbai Kerupuk Udang	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						108	Kelompok Nelayan Membangun Ikan Asin	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						109	IKM Mama Aisyah Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						110	IKM Mama Zahro Pentol Ikan	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
						111	IKM Berkat Motekar	Ds. Pemuda, Kec. Pelaihari
						112	IKM Batu Balai	Ds. Batilal, Kec. Takisung
						113	IKM Kecap Kelulut	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar
						114	IKM Minuman Herbal dan VCO Bu Kokom	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
						115	IKM Kerupuk Haruan Acil Rapidah	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati
						116	IKM Kerupuk Haruan Acil Rusmanina	Ds. Benua Raya Kec. Bati - Bati
						117	IKM Perbengkelan Maju Bersama	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar





Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
						118	IKM Kerupuk Udang Harapan Bersama	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						119	IKM Kerupuk Parimata	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						120	IKM Kerupuk Seafood Lestari	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
						121	IKM Alike Cake	Ds. Kintap Kecil, Kec. Kintap
						122	Bumdes Mandiri Sejahtera (Lahang)	Ds. Guntung Besar, Kec. Pelaihari
						123	IKM Kerupuk Pantai Indah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
						124	IKM Kerupuk Telur Asin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati
						125	IKM Kerupuk Budi Bersama	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						126	IKM Keripik Jaya Makmur	Gunung Melati RT.006/RW.002
						127	IKM Madu Kelulut Sakatalu	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai



Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

No	Industri Kreatif	Industri Kreatif	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
								Bakar, Kec. Bajuin
						128	IKM Kerupuk Cinta Rasa	Jl. Datu Pamelutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						129	IKM Kerupuk Mercusuar	Jl. Datu Pamelutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						130	IKM Kerupuk Pulau Datu	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						131	IKM Kerupuk Karnita	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan
						132	IKM Kerupuk Mama Zidan	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						133	IKM Radjamadu	Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
						134	IKM Madu Gunung Katunun	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari

Keterangan :

INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) YANG MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIVITAS INDUSTRI (INDUSTRI KREATIF)

Tahun	Target di RPJMD	Realisasi
2020	10 unit usaha	25 unit usaha
2021	15 unit usaha	103 unit usaha
2022	20 unit usaha	134 unit usaha

Pada tahun 2021 target jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 15 unit usaha, terealisasi 103 unit usaha. Sedangkan pada tahun 2022 target jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 20 unit usaha, realisasinya ada 134 unit usaha, sebagaimana terinci pada tabel di atas.

Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan dan pembinaan intensif dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut, Kementerian Agama maupun dari Pokir DPR RI . Di Tahun 2022, dana - dana kegiatan pembinaan IKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut mengalami belum sepenuhnya pulih. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari data pelatihan, data pertumbuhan jumlah industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun pada tahun 2022 terdapat sebanyak 4719 IKM dengan sebaran data sebagai berikut :



Tabel 3.3
Rekap Data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
1	Bajuin	Bajuin	15	3	1	17
		Galam	21	8	1	28
		Ketapang	16	13	0	29
		Kunyit	27	7	0	34
		Pemalongan	14	0	0	14
		Sungai Bakar	9	41	1	49
		Tanjung	13	0	0	13
		Tebing Siring	17	0	0	17
		Tirta Jaya	20	8	0	28
2	Bati-Bati	Banyu Irang	43	13	3	53
		Bati-Bati	43	0	0	43
		Bentok Darat	27	33	3	57
		Bentok Kampung	25	0	0	25
		Benua Raya	15	0	0	15
		Kait-Kait	27	0	1	26
		Kait-Kait Baru	36	7	5	38
		Liang Anggang	59	16	3	72
		Nusa Indah	33	0	0	33
		Padang	31	12	4	39
		Pandahan	139	19	19	139
		Sambangan	17	0	0	17
		Ujung	53	12	22	43
Ujung Baru	36	0	2	34		
3	Batu Ampar	Ambawang	9	0	0	9
		Batu Ampar	24	22	9	37

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
		Bluru	20	0	0	20
		Damar Lima	15	0	2	13
		Damit	30	18	4	44
		Damit Hulu	17	19	6	30
		Durian Bungkok	49	3	0	52
		Gunung Mas	25	14	3	36
		Gunung Melati	19	0	1	18
		Jilatan	16	0	0	16
		Jilatan Alur	11	0	1	10
		Pantai Linuh	10	0	0	10
		Tajau Mulya	16	11	7	20
		Tajau Pecah	39	41	11	69
4	Bumi Makmur	Bumi Harapan	6	21	0	27
		Handil Babirik	17	45	3	59
		Handil Birayang Atas	13	0	0	13
		Handil Birayang Bawah	3	0	0	3
		Handil Gayam	10	63	0	73
		Handil Labuan Amas	10	0	0	10
		Handil Maluka	7	13	0	20
		Handil Suruk	11	20	0	31
		Kurau Utara	14	45	2	57
		Pantai Harapan	15	0	0	15
		Sungai Rasau	15	0	0	15
5	Jorong	Alur	20	0	0	20
		Asam Asam	21	0	3	18

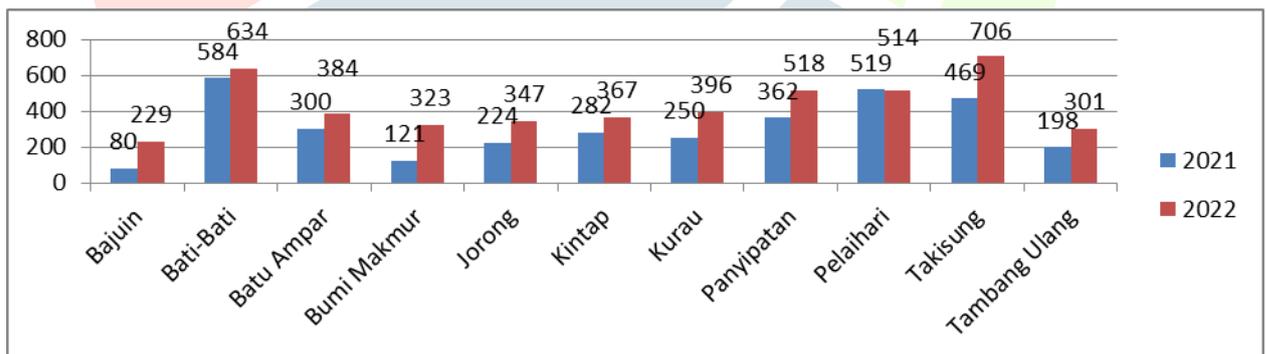
No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
		Asam Jaya	25	36	6	55
		Asri Mulya	11	9	4	16
		Batalang	4	0	0	4
		Jorong	36	5	14	27
		Karang Rejo	19	11	2	28
		Muara Asam Asam	18	0	1	17
		Sabuhur	17	63	2	78
		Simpang Empat Sungai Baru	33	35	4	64
		Swarangan	20	0	0	20
6	Kintap	Bukit Mulia	16	0	0	16
		Kebun Raya	38	0	2	36
		Kintap	28	0	0	28
		Kintap Kecil	42	0	2	40
		Kintapura	15	0	0	15
		Mekar Sari	21	0	0	21
		Muara Kintap	25	0	0	25
		Pandan Sari	22	21	0	43
		Pasir Putih	15	0	0	15
		Riam Adungan	4	0	0	4
		Salaman	5	0	0	5
		Sebamban Baru	21	0	0	21
		Sumber Jaya	12	35	1	46
Sungai Cuka	18	35	1	52		
7	Kurau	Bawah Layung	11	0	0	11
		Handil Negara	79	10	8	81
		Kali Besar	35	0	0	35

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
		Kurau	17	14	0	31
		Maluka Baulin	10	53	2	61
		Padang Luas	16	34	0	50
		Raden	11	0	0	11
		Sarikandi	20	15	2	33
		Sungai Bakau	12	0	0	12
		Tambak Karya	25	0	0	25
		Tambak Sarinah	14	33	1	46
8	Panyipatan	Batakan	61	117	5	173
		Batu Mulya	33	0	4	29
		Batu Tungku	30	11	6	35
		Bumi Asih	19	0	0	19
		Kandangan Baru	40	11	15	36
		Kandangan Lama	32	11	2	41
		Kuringkit	36	30	11	55
		Panyipatan	43	21	1	63
		Suka Ramah	37	5	6	36
		Tanjung Dewa	31	0	0	31
9	Pelaihari	Ambungan	29	0	0	29
		Atu-Atu	11	0	0	11
		Bumi Jaya	46	0	0	46
		Guntung Besar	13	0	0	13
		Kampung Baru	23	0	0	23
		Kelurahan Angsau	14	0	0	14
		Kelurahan Karang Taruna	48	0	0	48

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
		Kelurahan Pabahanan	39	0	1	38
		Kelurahan Pelaihari	45	0	0	45
		Kelurahan Sarang Halang	19	0	0	19
		Panggung	12	0	0	12
		Panggung Baru	23	0	3	20
		Panjaratan	17	0	0	17
		Pemuda	36	0	0	36
		Sumber Mulia	25	0	0	25
		Sungai Riam	38	0	0	38
		Tampang	18	0	1	17
		Telaga	27	0	0	27
		Tungkaran	7	0	0	7
		Ujung Batu	29	0	0	29
10	Takisung	Batilai	29	31	3	57
		Benua Lawas	28	31	0	59
		Benua Tengah	34	32	5	61
		Gunung Makmur	54	0	1	53
		Kuala Tambangan	38	0	0	38
		Pagatan Besar	69	0	0	69
		Ranggang	33	31	6	58
		Ranggang Dalam	18	0	0	18
		Sumber Makmur	39	49	4	84
		Tabanio	32	0	0	32
		Takisung	68	80	2	146
Telaga Langsung	27	8	4	31		

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2022			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL
11	Tambang Ulang	Bingkulu	14	0	0	14
		Gunung Raja	35	31	5	61
		Kayu Abang	13	0	1	12
		Martadah	12	10	0	22
		Martadah Baru	24	0	0	24
		Pulau Sari	31	33	7	57
		Sungai Jelai	24	6	2	28
		Sungai Pinang	10	17	0	27
		Tambang Ulang	35	23	2	56
TOTAL			3461	1524	266	4719

Grafik 3.1
Jumlah IKM Tahun 2022 di Kab. Tanah Laut



Sehingga melalui hasil pendataan tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.461 industri menjadi 4.719 industri atau terjadi peningkatan 36,35 % .

Selain itu, pada tahun 2022 telah disusun Dokumen Deliniasi Kawasan Industri Jorong dimana dokumen ini bertujuan untuk :

1. Membantu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam

penyusunan dokumen penunjang pembangunan Kawasan Industri dalam bentuk Perencanaan Deliniasi Kawasan Industri Jorong yang merupakan bagian dari output Rencana Induk (Master Plan) Kawasan Industri sebagaimana yang diamanahkan dalam Permenperin No. 40 Tahun 2016;

2. Membantu mengakomodir rencana pengembangan sektor industri Kabupaten Tanah Laut, baik secara eksisting maupun pengembangan kedepannya;
3. Membantu melengkapi persyaratan pengajuan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi Calon Pengelola Kawasan Industri

Dari Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan dan dana mandiri, IKM yang difasilitasi Hak Merk antara lain :

Tabel 3.4
Daftar IKM Yang Difasilitasi Hak Merk Dari Sumber Dana DID

NO	NAMA IKM	MEREK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
1	D'Ncef	D'Ncef	Hijria Septi Anggraeni	Jl. Pendidikan RT.02/RW.01, Desa Ambungan	Dana Dekon Prov. KalSel
2	Airas	Airas	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaihari	MANDIRI
3	Rafidah	Rafidah	Rafidah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.004 Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel
4	Atiah	Atiah	Atiah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.005 Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel

NO	NAMA IKM	MERЕК	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
5	Kerupuk Ikan Haruan Ibu Rusmaninah	Kerupuk Ikan Haruan Ibu Rusmaninah	Rusmaninah	Jl. Masjid Ihyaudin RT.009/RW.004, Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Dana Dekon Prov. KalSel
6	Calap Baimbai Sasirangan	Calap Baimbai Sasirangan	Hj. Siti Syarah	Jl. A. Yani RT.011/RW.002, Ds. Jorong Kec. Jorong	Dana Dekon Prov. KalSel
7	Arthadeva Gallery	Arthadeva Gallery	Sri Rahayu	Desa Martadah Baru RT.002/RW.001, Kec. Tambang Ulang	Dana Dekon Prov. KalSel

Pada tahun 2022, total 61 IKM yang kita fasilitasi Sistem Jaminan Halal, dengan rincian sebanyak 54 IKM Pangan yang difasilitasi melalui Self Delcare dan sebanyak 7 IKM difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada table berikut :

Tabel 3.5
Daftar IKM Yang Difasilitasi Sistem Jaminan Halal Melalui Self Delcare Dan Dana DID

NO	NAMA IKM	MERЕК	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
1	POKLAHSAR BINA BERSAMA	PARIMATA	Helda	Jl. Pelabuhan Barat RT. 005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
2	POKLAHSAR HARAPAN BERSAMA	HARAPAN BERSAMA	Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
3	IKM MAMA ZIDAN	MAMA ZIDAN	Rusniah	Jl. Muhara RT.002/RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang



NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
4	KELOMPOK CINTA RASA	CINTA RASA	Norhayani	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
5	KELOMPOK PULAU DATU	PULAU DATU	Endang Rahmawati	Jl. Pelabuhan Rt.01 Rw.01 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk ikan & Udang, abon ikan dan Amplang ikan
6	KELOMPOK KARNITA	KARNITA	Maryam	Jl. Pariwisata RT.021/RW.011, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
7	KELOMPOK MERCUSUAR	MERCUSUAR	Khadijah	Jl. Datu Pamalutan RT.001/RW.001 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
8	KELOMPOK KTH. SAKATALU	MAMA NISA	Salabiah	Jl. Goa Marmer RT.005/RW.002, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Keripik Pisang
9	LPHD SUNGAI BAKAR	LPHD SUNGAI BAKAR	Sukatman	Jl. Wisata Air Terjun RT.001/RW.001, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Keripik Sukun dan Rempeyek
10	KELOMPOK SEAFOOD LESTARI	MAMA MADAN	Asmah	Perumahan Putih RT.015/RW.001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
11	KERUPUK IKAN HARUAN RAPIDAH	RAPIDAH	Rafidah	Jl. Suka Maju RT.014/RW.004, Desa Benua Raya, Kec. Bati-Bati	Kerupuk Ikan
12	UR. KRYSTAL	UAP DAN UKACAN	Nor Latipah	Jl. KH. Achmad Nawawi, RT.001/RW.001, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Bumbu Rujak



NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
13	MAMA NAURA	MAMA NAURA	Darti Sutini	Komplek Daffa Land. No. 18 Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Jahe Serbuk
14	KUB. JAYA MAKMUR	ECO	Bambang Eko Nurdiansyah	Gunung Melati RT.006/RW.002	Aneka Keripik
15	KUB. JAYA MAKMUR	ECO	Bambang Eko Nurdiansyah	Gunung Melati RT.006/RW.002	Aneka Keripik
16	KELOMPOK BUDI BERSAMA	PUKAHA	Kartini	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec.Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
17	SACHA INCHI BORNEO	AIS	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/ RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Madu Kelulut
18	SACHA INCHI BORNEO	SACHA INCHI BORNEO	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/ RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Minyak Sacha Inchi
19	SACHA INCHI BORNEO	SACHA INCHI BORNEO	Mas Arif Biantoro	Jl. Matah II, RT.007/ RW.003, Desa Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Snack Sacha Inchi
20	KUB. SARI LAUT 2	MAMA ROFI'I	Nurul Yuhana	Jl. Niaga RT.008/RW.004, Tabanio, Kec. Takisung	Amplang
21	KUB. SARI LAUT 2	BENTENG TABANIO	Nurul Yuhana	Jl. Niaga RT.008/RW.004, Tabanio, Kec. Takisung	Kerupuk Ikan dan Udang
22	IQLIMA BAKERY	IQLIMA BAKERY	Wardatul Firdausi	Jl. Sejahtera RT.008 No. 51 Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Roti dan Kue
23	IKM SAKDIJAH	SAKDIJAH	Sulikah	Desa Bingkulu RT.001/RW.001,	Makanan Ringan (Aneka Stik)

NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
				Kec. Tambang Ulang	
24	GAPOKTAN HIDUP MAKMUR	KOPI KATUNUN	Katiman	Katunun, RT.003/RW.003 Desa Telaga, Kec. Pelaihari	Kopi Bubuk
25	UMKM ARIFIN	AL WAFI	Muhammad Noor Arifin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	Kerupuk Telur Asin
26	UMKM ARIFIN	AL WAFI	Muhammad Noor Arifin	Jl. A. Yani KM. 28 RT.007 RW.002 Desa Pandahan, Kec. Bati-Bati	Telur Asin
27	HB BORNEO	KELULUT	Firdaus Hari Laksana	Desa Gunung Melati RT.011/RW.002, Kec. Batu Ampar	Kecap Manis
28	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	Jamu Instan
29	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	VCO
30	Bu KOKOM	Bu KOKOM	Siti Komsianah	Desa Tirta Jaya RT.001/RW.001, Kec. Bajuin	Madu Mongso
31	HAFIZH ADZKA	HAFIZH ADZKA	Yuyun Rahmadini	Perumahan Cipta Indah Permai (CIP) Blok D No 32 Atu-Atu	Risoles Frozen
32	KELOMPOK PANTAI INDAH	PANTAI INDAH	Hamsiah	Jl. Pahlawan RT.007/RW.002, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udag
33	BUMDES MANDIRI SEJAHTERA	GMS	Noor Afidah	Jl. Wahyu Hartopo RT.001/RW.001, Desa Guntung Besar	Air Aren/Lahang





NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
34	KUB. PESONA TANJUNGPONDONG	DUITRI	Rina	Jl. Pelabuhan Barat, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Ugang
35	KTH. KARIYA JAYA	M@YUN	Mawardi	Bendungan PTP RT.001/ RW.003 Desa Ambungan	Jahe Instan
36	ALIKA CAKE	ALIKA CAKE	Fathol Jannah	JL. A. Yani RT.005/RW.002, Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap	Roti dan Kue
37	KERUPUK IKAN IBU BADARIYAH	KERUPUK IKAN IBU BADARIYAH	Ideres atau Badariyah	Jl. Pariwisata RT.021/RW.005, Desa Batakan, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Ugang
38	KELOMPOK BATU BALAI	ALGUSREN	M. Alfin	Desa Batilai Rt.04/02, Kec. Takisung	Gula Merah Dan Gula Semut
39	D'TIYA	D'TIYA	Sumani	Jl. Ibunda Rt.05 Rw.01 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	Getuk
40	FARHAN SNACK	FARHAN SNACK	Melda Rosalina	Desa Pulau Sari Rt.04/02, Kec. Tambang Ulang	Akar Pinang, Kacang Bawang, Makaroni, Keripik Ketumbar
41	LINA BAKERY	ROTI LINA	Saleha	Desa Handil Negara Rt.003 Rw.001 Kec. Kurau	Roti Manis
42	QUR'AS MADU	QUR'AS MADU	Suratmin	Desa Benua Tengah Rt.018 Rw.005 Kec. Takisung	Madu Kelulut
43	KARYA BERSAMA	3 ARDI	Supardi	Jl. Taruna Jaya Rt.12/04 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Keripik Jamur
44	MTAK SRI	MTAK SRI	Sri Sumaryati	Jl. Raya Takisung Rt.003 Desa Banua Tengah Kec. Takisung	Jahe Instan



NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
45	KELOMPOK SABITERA	RIANI	Muhammad Sabil Mubtadin	Desa Takisung Rt.11 Rw.04 Kec. Takisung	Kerupuk Ikan Dan Udang
46	KTH. SUBUR MAKMUR	MTAK SITI	Abd. Basir	Katunun Rt.03 Rw.03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	Keripik Singkong, Talas, Pisang, Pare
47	KUE KERING NURKAH	BATANG JABUK	Nurkah	Jl. Raya Takisung Rt.04 Rw.02, Gg. Jakasuma Desa Telaga Kec. Pelaihari	Popia Original & Premium
48	GILA RASA	GILA RASA	Imam Wahyudi	Jl. Panembahan Senopati Rt.09a Rw.004 Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari	Nugget Jamur
49	TANAH LAUT MANIS	KANDANGAN LAMA MANIS	Sayid Hasan	Desa Kandangan Lama Rt.04/02, Kec. Panyipatan	Gula Merah Dan Gula Semut
50	DADARINGAN	DADARINGAN	Mega Yusrina	Ranggang Desa Ranggang, Takisung	Gula Semut
51	MAMA ARKHA	MAMA ARKHA	Amelia Agustina	Jl. Datu Daim No.89, Pelaihari	Gula Merah
52	BU LASMI	BU LASMI	Lasmiatun	Ranggang Rt.01, Kec. Takisung	Sambal Pecel
53	NJH	NJH	Nining Eko Puji Lestari	Jl. Untung Suropati Rt.003/Rw.001 Sebamban, Ds. Kebun Raya	Jamu Tradisional/ Minuman Herbal
54	RAJA GUNUNG	WIDARNINGSIH	Cap Raja Gunung	G'g Harapan Maju Rt.005/Rw.002, Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang	Jamu Tradisional/ Minuman Herbal
55	KTH. BATU KURA	KEMIRI KITA	Ibnu Kasim	Desa Galam Rt.004/Rw.002, Kec. Bajuin	Kemiri Kupas
56	YOTRO TEKO BERKAH (YTB)	YOTRO TEKO BERKAH (YTB)	Eka Dewi Kharisman	Jln. Pangeran Antasari Rt.004/Rw.001, Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin	Aneka Makanan Ringan Siap Santap



NO	NAMA IKM	MERK	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
57	TAZAKACAKE	TAZAKACAKE	Ariesta Shinta Wati	Jl. Swadaya No.70 Balirejo Rt.18b Rw.006	Bakeri
58	DAPUR KAMILAH	DAPUR KAMILAH	Suci Setioningsih	Bingkulu Rt.001/Rw.003, Kec. Tambang Ulang	Aneka Makanan Ringan Siap Santap
59	MIMI DONKENT	MIMI DONKENT	Fenina Noos Islamiyah	Komp. Bajuin Raya Jl. Arwana No.52, Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari	Donat Kentang
60	MAMA ZEVA	MAMA ZEVA	Suhartati	Desa Maluka Baulin Rt.005/Rw.001, Kec. Kurau	Kerupuk Udang
61	POKLAHSAR KARYA	ASOY	Norhana	Jl. Hangtuh Rt.002/Rw.001 Kec. Jorong	Kerupuk Udang Dan Ikan

A. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah :

1. Tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah kemasan, baik untuk pembelian mesin peralatan maupun pembangunan workshop.

2. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID)

Untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2022 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak bisa kami laksanakan. Begitupun dengan fasilitasi hak merek

tahun 2022 ini berasal dari dana provinsi sehingga masih banyak IKM yang belum terfasilitasi Hak Merek.

3. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran, sehingga pada tahun ini, kita tidak dapat mengikuti pameran incraft yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia dan berpotensi besar untuk promosi produk.
4. Kurangnya pelatihan softskill yaitu pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk memperlihatkan kembali kemampuan atau minat seseorang yang berasal dari dirinya sendiri, lebih tepatnya disebut dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang.
5. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru.

B. Solusi

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Mendorong pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementerian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
2. Mendorong Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan TAPD agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mendapatkan alokasi DID yang dapat kami manfaatkan untuk pemulihan ekonomi IKM dan untuk standarisasi produk IKM
3. Kerjasama dengan SKPD lain khususnya terkait promosi produk dan investasi.
4. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut,

pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.

5. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut.

C. Rencana Aksi

1. Menumbuhkan sentra-sentra Industri Kecil Menengah
2. Mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online.
3. Mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Tahun 2022 ada 16 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah.
4. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun

lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.

5. Mendorong sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil.
6. Penggunaa Aplikasi Sosialita dan EKatalog local dalam belanja pengadaan.
7. Mengaktifkan pelayanan desain produk di Rumah Kemasan.

2. Eselon II (Kepala Dinas)

Tabel 3.6
Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,27%	71,12 %	70,92%	99,72%	71.9%	98,64%
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 Tingkat kesempatan kerja	96,48%	5,5 %	95,83%	1742,36%	6.5%	1474,31%
3.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	1 Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	44%	40,0%	40%	100%	42,5%	94,12%
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,19%	15,57%	12,50%	80,28%	16,35%	76,45%
5.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat Baik	Memuaskan	100%	Sangat Baik	100%

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.



1. Target dan Capaian IKU

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustria Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.7
Target dan Capaian IKU Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,12 %	70,92 %	99,72 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	5,5 %	95,83 %	1742,36 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	40 %	40 %	100 %
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,57 %	12,60 %	80,92%
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Memuaskan	100 %

Uraian dan Analisa Capaian IKU

a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah berupa dukungan anggaran dan konsistensi politis untuk mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat



mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah melalui peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian atau kompetensi tenaga kerja, pemagangan berbasis kompetensi serta penciptaan wirausaha baru.

Pada Tahun 2022 daya saing tenaga kerja daerah dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,92%, menurun dari tahun 2021 sebesar 72,27%. Penurunan TPAK ini menggambarkan menurunnya tingkat partisipasi penduduk yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru. Pada tahun 2022 hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian dukungan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja telah dilaksanakan melalui berbagai program yang dikucurkan dengan sumber dana APBN maupun APBD yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD pengampu kebijakan di sektor tersebut.

b. Meningkatnya Kesempatan kerja

Terjadinya peningkatan kesempatan kerja pada tahun 2022 bisa dilihat pada angka realisasi sebesar 95,83 persen dari target 5,5 persen. Angka 95,83 persen di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 176.458 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 184.133 orang, Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang semakin tinggi. Hal ini terlihat dari



Peningkatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2022 sebesar 13,38 persen dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 119 orang dari 889 pencari Kerja yang terdaftar.

c. **Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial.**

Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial ditandai dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 40% atau tercapai 100 %, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 44% atau dengan capaian 51,43 %.

d. **Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri.**

Meningkatnya produktivitas sector industry mengalami kenaikan ditandai dengan Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 12,60%, yang meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 12,56%.

e. **Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.**

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ditandai dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 dengan nilai 90,34 (Sangat Baik) meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan nilai 89,59 (Sangat Baik)



Capaian Sasaran Strategis

disnakerind

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”**.
2. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kesempatan Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kesempatan Kerja”**.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “**
4. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri”**.
5. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90%	70,30%	71%	71,12%	71,90%
2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	3%	3,5%	4%	5,5%	6,5%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%
4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,50%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%
5	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Capaian Sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

1. Sasaran 1 (Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja).

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara ≤ 15 dan 64 tahun.

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah Angkatan Kerja

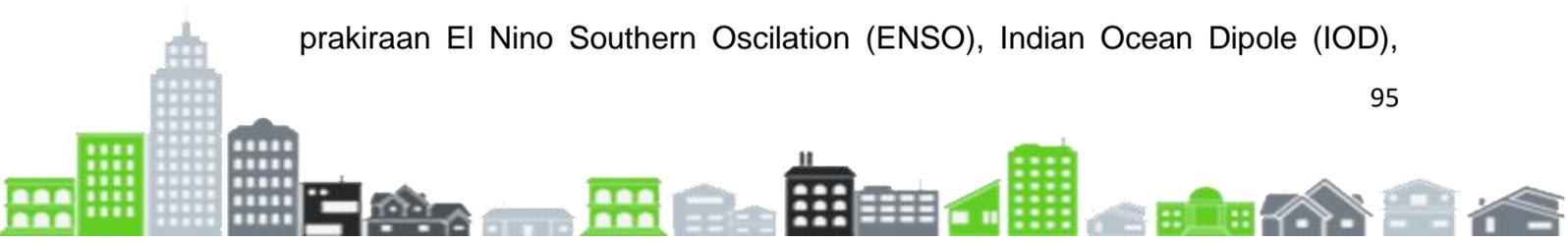
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 ini mencapai 70,92% atau naik 1,35% dari tahun 2021 sebesar 72,27%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2022

INDIKATOR	2021	2022
ANGKATAN KERJA (Orang)	185.049	184.133
BEKERJA (Orang)	178.543	176.458
PENGANGGURAN (Orang)	6.506	7.675
TPAK (%)	72,27	70,92
TPT (%)	3,52	4,17
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	256.054	259.629
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,48	95,83

TPAK yang cukup besar menggambarkan cukup banyak penduduk yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru, baik di sektor formal dan sektor informal, jika kita perhatikan bahwa di saat perekonomian masih dalam tahap pemulihan akibat adanya pandemic Covid-19, ternyata faktor cuaca yang tidak menentu pada tahun 2022 memberikan dampak yang besar pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Faktor cuaca yang tidak menentu ini akibat dampak dinamika atmosfer dan laut serta prakiraan El Nino Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD),



monsoon dan suhu permukaan laut (SST). Kondisi cuaca ini menjadi penyebab terjadinya kegagalan panen padi palawija dan penurunan produksi perikanan, baik perikanan darat maupun laut. Sementara mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut bekerja di Sektor Pertanian yaitu sebesar 49,52 persen pada tahun 2022.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi 704 orang pencari kerja dari 15 paket pelatihan yaitu Juru las SMAW 3G, Service Sepeda Motor Konvensional, Service Sepeda Motor Injeksi, Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industry, Instalasi Penerangan, Finishing Teknik Semprot, Juru Gambar, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Pengolahan Hasil Perikanan, Perawatan Ac Split, Operator Basic Office, Desain Grafis, Video Editing, Pembuatan Roti dan Kue, Tata Rias Kecantikan Rambut yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati dan BLK Komunitas Darussalim juga berhasil meningkatkan kompetensi 64 orang pencari kerja dari 4 paket pelatihan dengan Kejuruan Komputer sedangkan 15 LPK Swasta dengan peserta yang lulus sebanyak 472 orang pencari kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) bagi 30 pencari kerja yang terdiri dari Pemagangan Dalam Negeri bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan sumber dana APBN. Pada kegiatan ini peserta yang dimagangkan di perusahaan yaitu PT. Panen Embun Kemakmuran dan PT. Sinar Nusantara

Industries mendapatkan keterampilan dan dilatih serta mendapatkan bimbingan oleh instruktur dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya.

Peserta magang yang lulus dan kompeten nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam memaknai memaknai persentase TPAK yang tinggi perlu memperhatikan :

1. **Pendidikan.**

Implementasi dari program pendidikan dasar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. **Usia.**

Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

3. **Jenis kelamin.**

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung capaian pada sasaran 1 dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.



1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD) dengan didukung kegiatan :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan 3 sub kegiatan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi (UPT BLK) dengan capaian 7 jenis kejuruan pelatihan yang dilaksanakan di desa-desa dari jumlah dana Rp. 9.997.986,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.597.986,- atau 86%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan capaian 20 perusahaan yang menerima pemagangan dari jumlah dana sebesar Rp. 9.792.542,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.989.972,- atau 81,59%.
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota dengan capaian hibah PC dan printer untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari jumlah dana sebesar Rp. 21.213.220,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.230.000,- atau 90,65%.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 1 sub Kegiatan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan capaian 20 orang Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja yang telah dilakukan pembinaan melalui Pelatihan Manajemen

Peningkatan Mutu Kelembagaan dari jumlah dana Rp. 11.981.944,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.916.944,- atau 74,42%.

c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi kepada Perusahaan Kecil dengan capaian 15 orang pelaku usaha kecil, mikro dan menengah dalam pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penguatan Daya Saing Perusahaan dari jumlah dana Rp. 6.930.648,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.460.648,- atau 64,36%.

Gambaran secara jelas terkait program, kegiatan dan sub kegiatan, target serta pagu anggaran yang mendukung pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Yang Mendukung Sasaran 1

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Latih yang Kompeten	75%	
I.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis	2 Jenis	41.003.748,00
		Jumlah Sosialisasi	2 Kali	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan/Bimbingan	40 Orang	9.997.986,00
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Tergabung dalam FKJP	20 Perusahaan	9.792.542,00
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis	2 Jenis	21.213.220,00
II.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Orang	20 Orang	11.981.944,00
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Orang	20 Orang	11.981.944,00
III.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	6.930.648,00
5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	6.930.648,00
		JUMLAH		59.916.340

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target pada sasaran di atas yang didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 32,90% dari target 70% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 59.916.340,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.195.550,- atau 87,35%

Adapun realisasi keuangan dan fisik program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta Latih yang Kompeten	75%					
I. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Jenis	2 Jenis	41.003.748,00	2 Jenis	100,00	35.817.958,00	87,35
		Jumlah Sosialisasi	2 Kali		2 Kali			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan/Bimbingan	40 Orang	9.997.986,00	40 Orang	100,00	8.597.986,00	86,00
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Tergabung dalam FKJP	20 Perusahaan	9.792.542,00	20 Perusahaan	100,00	7.989.972,00	81,59
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis	2 Jenis	21.213.220,00	2 Jenis	100,00	19.230.000,00	90,65
II. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Orang	20 Orang	11.981.944,00	20 Orang	100,00	8.916.944,00	74,42
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Orang	20 Orang		20 Orang			
III. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	6.930.648,00	15 Orang	75,00	4.460.648,00	64,36
5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang		15 Orang			
JUMLAH				59.916.340		92%	49.195.550	75,38

C. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung sasaran 1 di atas pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2022 memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 22 orang PNS dan dibantu dengan 8 orang tenaga honorer, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Sasaran 1

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang	Pembina / IV a	1 Orang
2	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	1 Orang
3	Pengatur Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang
4	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pembina / IV a	1 Orang
5	Pengadministrasian Umum Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
6	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang
7	Kepala UPT BLK	Pembina Tk. I / IV d	1 Orang
8	Kepala Subbag TU UPT BLK	Penata Muda / III a	1 Orang
9	Pengadministrasian Umum Pada UPT BLK	Juru / I c	1 Orang
10	Pengadministrasian Keuangan pada UPT BLK	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
11	Instruktur Penyelia	Penata Tk. I / III d	1 Orang
12	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	3 Orang
		Penata / III c	1 Orang
13	Instruktur Pertama	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
14	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk. I / III b	2 Orang
		Penata Muda / III a	1 Orang
15	Ahli Pertama Instruktur	Penata Muda / III a	3 Orang
16	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja	PTT pada Bidang P2TK	1 Orang
17	Pengadministrasian Umum	PTT pada Bidang P2TK	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
18	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	PTT pada UPT BLK	1 Orang
19	Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan	PTT pada UPT BLK	2 Orang
20	Petugas Kebersihan	PTT pada UPT BLK	2 Orang
21	Petugas Keamanan	PTT pada UPT BLK	1 Orang

D. Analisis Kendala

Pada tahun 2022 dalam rangka pemulihan dampak pandemic Covid-19 serta akibat kondisi cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Tanah Laut di mana dampaknya adalah pelambatan perekonomian serta peningkatan angka TPT, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam memaknai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi karena dipengaruhi oleh factor sebagai berikut :

- ❖ Demografi yaitu penambahan jumlah penduduk.
- ❖ Perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani.
- ❖ Jumlah lulusan sekolah cukup tinggi sehingga pencari Kerja cukup banyak akan tetapi lapangan pekerjaan baik dari informal dan formal belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga Kerja.
- ❖ Kebijakan perusahaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 dimana menurunnya sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta sektor lapangan usaha pertanian dan industri, dengan tujuan supaya perusahaan tidak gulung tikar diantaranya dengan merumahkan karyawan, mengurangi jam kerja karyawan, menunda perekrutan karyawan baru serta memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



E. Saran dan Solusi

Menanggapi kendala di atas, maka perlu dilakukan :

1. Pemagangan yang di biayai oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.
2. Mendorong pemagangan mandiri yang dilakukan oleh perusahaan .
3. Pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun kewirausahaan kepada pencari kerja.
4. Meningkatkan produktivitas LPK untuk melatih pencari kerja.
5. Meningkatkan kerjasama kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBN yang tujuannya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.
6. Meningkatkan kerjasama kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalsel untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBD propinsi yang tujuannya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.

F. Rencana Aksi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan Balai Besar di bawah Kementerian Ketenagakerjaan agar pencari kerja atau peserta latih dari Kabupaten Tanah Laut mendapat kesempatan untuk menjadi peserta pelatihan di Balai Besar dengan sumber dana APBN atau sharing dengan sumber dana APBD.



2. Khusus untuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Samarinda akan dikirimkan peserta untuk pelatihan Operator Alat Berat sebanyak 16 orang dengan sumber dana APBD.
3. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi dan berbasis kemasyarakatan di desa baik melalui kegiatan Manunggal Tuntung Pandang maupun BLK komunitas.
4. Melaksanakan pemagangan dalam negeri yaitu pemagangan di perusahaan baik melalui dana APBN maupun APBD.
5. Mendukung BLK Komunitas untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Peningkatan kesempatan kerja di lihat dari persentase sebesar 95,83 persen dari target 5,5 persen di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 176.458 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 184.133 orang dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun sektor informal terbuka luas di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan target pada maka tingkat kesempatan kerja pada tahun 2022 jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan TKK pada tahun 2022 dengan TKK tahun 2021 terjadi penurunan kesempatan kerja dimana pelayanan penempatan tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (pada sektor formal) adalah 19,23 persen yaitu dari 220 orang dari 1.144 orang pencari kerja pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam jumlah pencari kerja terdaftar yaitu 889 orang dan yang ditempatkan adalah 119 orang pada tahun 2022 atau dengan persentase sebesar 13,38%.

Untuk mendukung capaian sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan :

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja didukung dengan 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, didukung dengan 1 kegiatan yaitu kegiatan penyusunan tenaga kerja (RTK) dengan sub kegiatannya adalah penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro. Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen RTK Mikro 1 dokumen, yang disusun oleh Perusahaan JBG yang berlokasi di Kecamatan Jorong.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan yaitu :

2. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi dan pencarian lowongan kerja bagi pencari dengan hasil menempatkan 119 orang pada tahun 2022.

3. Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja yang tahun 2022 mampu terlaksana sebanyak 20 orang.

4. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan penjangkaran calon wirausaha baru melalui kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur pada acara Manunggal Tuntung Pandang yang setiap minggu dilaksanakan di desa tempat acara Manunggal Tuntung Pandang berlangsung. Tahun 2022 mampu tercapai sebanyak 306

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan



pengawasan ke kecamatan atau perusahaan yang ada di kecamatan tersebut terkait dengan keberadaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang didirikan dan beroperasi di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pengawasan ini mampu terlaksana sebanyak 6 kali, di kecamatan Kintap, Jorong, Tambang Ulang, Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur

c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- ✓ Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan dan keluarganya yaitu pelatihan Pembuatan Roti pelatihan ini bertujuan agar PMI Purna dan keluarganya memiliki keterampilan dan berdaya secara ekonomi. Pada tahun 2022 mampu tercapai 20 PMI Purna yang mengikuti pelatihan dimaksud.

Gambaran secara jelas terkait program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	5,5%	17.585.433,00
I.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD	1 Dokumen	17.585.433,00
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan yang Menyusun Dokumen RTK Mikro	1 Perusahaan	17.585.433,00
B.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	4%	120.333.024,00
II.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	155 Orang	95.813.148,00
2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	35 Orang	51.393.481,00
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Bimbingan dan Penyuluhan	20 Orang	9.406.515,00
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang	100 Orang	35.013.152,00
III.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Dokumen Perizinan Pendirian/ Pembentukan LPTKS	2 Dokumen	2.490.000,00
		Banyaknya monitoring ke LPTKS	4 Kali	
5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Banyaknya Monitoring ke LPTKS	4 Kali	2.490.000,00
IV.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Purna PMI yang Mendapat Perlindungan	20 PMI Purna	22.029.876,00
6	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Purna PMI yang Mendapatkan Perlindungan	20 PMI Purna	22.029.876,00

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target pada sasaran diatas yang didukung dengan 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang didukung dari dana APBD. Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.585.433,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.542.957,- atau 99,76%. Sedangkan pada Program Penempatan Tenaga Kerja dengan jumlah dana sebesar Rp. 120.333.024 dengan realisasi sebesar Rp. 115.749.343,- atau 96,65%.

Secara lebih rinci realisasi keuangan dan fisik program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Yang Mendukung Sasaran 2

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	5,5%	17.585.433,00	-	100,00	17.542.957,00	99,76
I.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD	1 Dokumen	17.585.433,00	-	100,00	17.542.957,00	99,76
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan yang Menyusun Dokumen RTK Mikro	1 Perusahaan	17.585.433,00	1 Perusahaan	100,00	17.542.957,00	99,76
B.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	4%	120.333.024,00	-	143,55	115.749.343,00	96,71
II.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	155 Orang	95.813.148,00	280 Orang	180,85	92.658.764,00	96,71
2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	35 Orang	51.393.481,00	119 Orang	340,00	49.831.284,00	96,96
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Bimbingan dan Penyuluhan	20 Orang	9.406.515,00	20 Orang	100,00	8.504.972,00	90,42
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang	100 Orang	35.013.152,00	310 Orang	310,00	34.322.508,00	98,03
III.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Dokumen Perizinan Pendirian/ Pembentukan LPTKS	2 Dokumen	2.490.000,00	1 Dokumen	150,00	2.400.000,00	96,39
		Banyaknya monitoring ke LPTKS	4 Kali		6 Kali			
5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Banyaknya Monitoring ke LPTKS	4 Kali	2.490.000,00	6 Kali	150,00	2.400.000,00	96,39
IV.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Purna PMI yang Mendapat Perlindungan	20 PMI Purna	22.029.876,00	20 PMI Purna	100,00	20.690.579,00	93,92
6	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Purna PMI yang Mendapatkan Perlindungan	20 PMI Purna	22.029.876,00	20 PMI Purna	100,00	20.690.579,00	93,92

Untuk mendukung sasaran diatas pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2022 didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 22 orang PNS dan dibantu dengan 8 orang tenaga honorer, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Sasaran 2

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang	Pembina / IV a	1 Orang
2	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	1 Orang
3	Pengatur Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
4	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pembina / IV a	1 Orang
5	Pengadministrasian Umum Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
6	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang
7	Kepala UPT BLK	Pembina Tk. I / IV d	1 Orang
8	Kepala Subbag TU UPT BLK	Penata Muda / III a	1 Orang
9	Pengadministrasian Umum Pada UPT BLK	Juru / I c	1 Orang
10	Pengadministrasian Keuangan pada UPT BLK	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
11	Instruktur Penyelia	Penata Tk. I / III d	1 Orang
12	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	3 Orang
		Penata / III c	1 Orang
13	Instruktur Pertama	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
14	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk. I / III b	2 Orang
		Penata Muda / III a	1 Orang
15	Ahli Pertama Instruktur	Penata Muda / III a	3 Orang
16	PTT	-	8 Orang

disnakerind

C. Analisis Kendala

Pada tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja didukung dengan 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan, analisis kendala dalam pelaksanaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.



1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, didukung dengan 1 kegiatan yaitu kegiatan penyusunan tenaga kerja (RTK) dengan sub kegiatannya adalah penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro. Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen RTK Mikro 1 dokumen, yang disusun oleh Perusahaan JBG yang berlokasi di Kecamatan Jorong.

Kendala : Pelaksanaan pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada Perusahaan untuk menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja mikro, memerlukan upaya yang kontinyu agar tersusun laporan terkait dengan perencanaan tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- d. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan yaitu :

5. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi dan pencarian lowongan kerja bagi pencari dengan hasil menempatkan 119 orang pada tahun 2022.

6. Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan



Perindustrian agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja yang tahun 2022 mampu terlaksana sebanyak 20 orang.

7. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan penjangkaran calon wirausaha baru melalui kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur pada acara Manunggal Tuntung Pandang yang setiap minggu dilaksanakan di desa tempat acara Manunggal Tuntung Pandang berlangsung. Tahun 2022 mampu tercapai sebanyak 306
- e. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - b. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS, yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melakukan pengawasan ke kecamatan atau perusahaan yang ada di kecamatan tersebut terkait dengan keberadaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang didirikan dan beroperasi di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pengawasan ini mampu terlaksana sebanyak 6 kali, di kecamatan Kintap, Jorong, Tambang Ulang, Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur
- f. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - ✓ Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan, kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada Pekerja

Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan dan keluarganya yaitu pelatihan Pembuatan Roti pelatihan ini bertujuan agar PMI Purna dan keluarganya memiliki keterampilan dan berdaya secara ekonomi. Pada tahun 2022 mampu tercapai 20 PMI Purna yang mengikuti pelatihan dimaksud.

Kendala : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 adalah 4,17 % atau berjumlah 7.675, ini menggambarkan besarnya jumlah penduduk yang perlu mendapatkan layanan Penempatan Tenaga Kerja, sementara jumlah personil pada bidang P2TK serta kegiatan yang dapat dilaksanakan terbatas.

D. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

- a. Meminta tambahan formasi CPNS Pengantar Kerja untuk memperkuat fungsi layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
- b. Diadakan nya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi pemberi kerja. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan



- c. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau investor dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Menetapkan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

E. Rencana Aksi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mencantumkan informasi lowongan pekerjaan.
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dan pemberi kerja perseorangan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan. Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam partisipasinya mengikuti pelaksanaan pameran



kesempatan Kerja/job fair yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

3. Memperkuat layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
4. Melaksanakan kegiatan Pemagangan Berbasis Pengguna dengan skema dana APBN dan dana APBD
5. Mengundang Narasumber dari BP2MI Pusat untuk menyampaikan peluang kerja ke luar negeri.
6. Melakukan kerjasama dengan UPT BP2MI di Banjarbaru serta Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran akan layanan Pekerja Migran Indonesia sampai tingkat kelurahan/desa.
7. Pada Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja ditargetkan melaksanakan kegiatan Pelatihan Soft Skill berbasis penumbuhan wirausaha yang bertujuan memicu minat serta mindset pemuda pemudi Kab.Tanah Laut untuk berwirausaha, dengan menghadirkan narasumber dari tingkat nasional.

3. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 20% dari 5 (lima) kasus pada Tahun 2021 menjadi 4 (empat) kasus di tahun 2022.

Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial sebagai salah satu kinerja utama dengan indikator persentasi penurunan kasus perselisihan

hubungan industrial merupakan sasaran strategis dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang didapat dari jumlah pengurangan kasus tahun berjalan dibanding dengan jumlah kasus tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100% :

$$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1} \times 100\% = \text{Penurunan Kasus}$$

Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus masuk sedangkan ditahun 2022 terdapat 4 kasus masuk, berikut dapat dilihat melalui tabel :

Tabel 3.16

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Tabel 3.17

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
3	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agrindotama		V		Anjuran Mediator/PHI
4	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 terdapat 5 kasus yang diselesaikan dan tahun 2022 terdapat 4 kasus yang diselesaikan sehingga ada penurunan sebanyak 1 kasus pada tahun 2022, dari data tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut :

$$\frac{5 \text{ KASUS} - 4 \text{ KASUS}}{5 \text{ KASUS}} \times 100\% = 20\%$$

Upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial juga menjadi sasaran utama bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih memfokuskan pada meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial. Hal ini terlihat dengan 4 (empat) kasus yang masuk untuk dibantu penyelesaiannya dapat dieksekusi dengan baik oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga yang pada tahun 2022 mencapai 25% cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. Sasaran ini disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung pada Sasaran 3 diatas ada pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana tahun 2022 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial, dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten, dengan 2 sub kegiatan :

- ✓ Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang mana output dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan sebanyak 4 dokumen mampu terealisasi sebanyak 17 dokumen atau 425%. Dimana dokumen yang disusun yaitu Peraturan Perusahaan yang telah disahkan.
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan yang mana output dari sub kegiatan ini adalah kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 16.500 orang dan 1 lembaga, mampu terealisasi sebanyak 19.816 orang atau 120,10%. Sedangkan untuk 1 lembaga yang ditargetkan teralisasi yaitu Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Laut.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan :

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota yang mana output dari sub kegiatan ini adalah jumlah kasus yang diselesaikan dengan target sebanyak 3 kasus, tahun 2022 mampu terealisasi juga sebanyak 3 kasus atau 100%. Dimana kasus-kasus yang masuk dan ditangani yaitu PT. Sukses Wijaya Adimakmur, PT. Sarana Subur Agrindotama, PT. Mitra Citra Gemilang.

Gambaran secara jelas terkait, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator, target kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Sengketa Perusahaan - Pekerja yang diselesaikan	30%	48.085.000,00
I.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah Peserta BPJS	16.500 Orang	31.735.000,00
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	4 Dokumen	15.175.000,00
	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	16.560.000,00
		Jumlah Peserta BPJS	16.500 Orang	
II.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan	3 Kasus	16.350.000,00
	3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	3 Kasus	16.350.000,00

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. 43,817,500,- atau 91,12% dari pagu sebesar Rp. 48,085,000,- yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 83,66%, yang realisasi kegiatan dan sub kegiatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten, dengan 2 sub kegiatan :
 - ✓ Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.175.000,-



mampu terealisasi sebesar Rp. 12.445.000,- atau 82,01%.

Sedangkan untuk realisasi fisiknya dari yang ditargetkan mampu terealisasi sebesar 120,10%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.560.000,- mampu terealisasi sebesar Rp. 15.360.000,- atau 92,75%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya dari yang ditargetkan mampu terealisasi 425%.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan :

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.350.000,- mampu terealisasi sebesar Rp. 14.562.500,- atau 89,07%. Sedangkan realisasi fisiknya dari yang ditargetkan mampu teralisasi sebesar 100%.

Adapun realisasi keuangan dan fisik program, kegiatan dan sub kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

disnakerind

Tabel 3.19
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Yang Mendukung Sasaran 3

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
		3	4	5	6	7	8	9
I.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Sengketa Perusahaan - Pekerja yang diselesaikan	30%	48.085.000,00	-	110,05	42.367.500,00	87,62
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah Peserta BPJS	16.500 Orang	31.735.000,00	19.816 Orang	120,10	27.805.000,00	87,62
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	4 Dokumen	15.175.000,00	17 Dokumen	425,00	12.445.000,00	82,01
	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	16.560.000,00	-	120,10	15.360.000,00	92,75
		Jumlah Peserta BPJS	16.500 Orang		19.816 Orang			
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan	3 Kasus	16.350.000,00	3 Kasus	100,00	14.562.500,00	89,07
	3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	3 Kasus	16.350.000,00	3 Kasus	100,00	14.562.500,00	89,07

C. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung sasaran 3 diatas pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatannya dibantu sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien namun tetap solid dalam menghadapi tantangan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 4 (empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 3 (satu) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Sasaran 1

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang	Penata Tk. I / III d	1 Orang
2	Mediator Hubungan Industrial Muda	Penata / III c	1 Orang
3	Pengatur Kerja Muda	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
4	Mediator Hubungan Industrial	Penata Muda / III a	1 Orang
5	Analisis Bahan Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial	PTT	1 Orang
6	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	PTT	1 Orang
7	Pengadministrasi Umum	PTT	1 Orang

Pada Tahun 2022, selain masih terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mempengaruhi pada perekonomian Indonesia, peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan juga mengalami perubahan yang signifikan sehingga ada penyesuaian pola kerja yang dilakukan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menurunkan beberapa Peraturan Pemerintah yang memebaharui tata cara pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang masing-masing Subkoordinator memformulakan rumusan untuk dapat menyesuaikan kegiatan, maka dapat diterangkan sebagaimana di bawah ini :

1. Penjelasan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak terjadi perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019. Kinerja utamanya adalah membantu meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta kepatuhan Pelaku HI terhadap Peraturan Per UU. Pada pelaksanaannya secara fisik telah terlaksana 120% atau 19.816 orang dari target sebesar 16.500 orang, hal ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan KCP Pelaihari.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1301-KUM/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021-2023 tanggal 3 Desember 2021, yang mana Dewan

Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tanah Laut dalam rangka :

1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan
2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten

b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dan unsur-unsur dalam Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut adalah Unsur Pemerintah, unsur Akademisi, unsur Pengusaha, unsur Pekerja dan unsur Buruh.

Tentang kepesertaan BPJS Tenaga Kerja selain Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Proyek Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Laut juga optimalisasi percepatan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja.

Baik Dewan Pengupahan Kabupaten dan optimalisasi kepesertaan BPJS Tenaga Kerja merupakan langkah strategis pemerintah kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera dimana akan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan keluarga sekaligus memberi dampak positif bagi pengembangan dunia usaha di Kabupaten Tanah Laut.

2. Penjelasan Hubungan Industrial

Dalam kegiatan Hubungan Industrial dimana ada sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

Kabupaten/Kota menargetkan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit masing-masing capaiannya sebesar 133% dan 100%.

Terlihat bahwa adanya peningkatan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pada tahun 2021 mencapai 56% menjadi 133% ditahun 2022, hal ini masih merupakan dampak dari penetapan target yang belum maksimal karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga tidak banyak aktivitas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan pelaksanaan mediasi pun masih terkendala belum adanya pejabat fungsional mediator di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih memerlukan kerjasama dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Terlebih lagi dengan adanya aturan baru tentang perhitungan pesangon yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mempersempit celah hukum dimana sering menjadi penyebab perselisihan hubungan industrial.

3. Penjelasan Persyaratan Kerja

Kinerja utama pada Persyaratan Kerja adalah kepatuhan terhadap penerapan norma syarat – syarat kerja yang memiliki indikator jumlah peraturan perusahaan yang disahkan. Pada tahun 2022 terdapat 16 (Enam belas) peraturan perusahaan yang disahkan.

Hal-hal yang berpengaruh dari tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan norma syaker ini diantaranya berupa implikasi atau dampak terhadap tinggi rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh

Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten. Semakin tinggi ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pengawas ketenagakerjaan berbanding lurus dengan semakin tingginya pengesahaan peraturan perusahaan dilaksanakan.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berkurang sehubungan dengan terbitnya surat nomor : 566/204/Disnakertrans tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang salah satunya misalnya adalah pengecekan terhadap pelaksanaan pencatatan kontrak kerja.

E. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya peraturan perusahaan;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir;
3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial pejabat fungsional mediator perlu segera mendapatkan SK legitimasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator;

4. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik;

5. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini;

6. Pembentukan dan mengoptimisasikan Lembaga Hubungan Industrial seperti Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit.

F. Rencana Aksi Tahun 2023

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2023 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian terkait untuk segera memfasilitasi mendapatkan SK legitimasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator;
2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pengesahan peraturan perusahaan yang dilaksanakan dan didanai penganggarannya melalui APBD tahun berjalan;
4. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
5. Mengoptimisasikan kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut.

4. Sasaran 4 (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2021 sebanyak 12,56 naik 0,4 poin menjadi 12,60 di Tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh Kinerja Subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Upaya peningkatan Kontribusi Sektor Industri yang telah dilaksanakan antara lain disajikan pada uraian singkat sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan

Pada Bidang Perindustrian, ada 3 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan antara lain sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.21

Program, Kegiatan dan Realisasi Tahun 2022 Pada Bidang Perindustrian

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri	100%	338.997.997,00	-	126,87	321.420.484,00	94,81
I. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Pertumbuhan IKM	6%	338.997.997,00	-	126,87	321.420.484,00	94,81
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Buku/Dokumen	105.149.999,00	1 Buku/Dokumen	100,00	98.609.000,00	93,78
2	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi	25 IKM	129.286.498,00	30 IKM	145,45	125.701.500,00	97,23
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan bagi pelaku IKM pangan dan perbengkelan	30 IKM		50 IKM			
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Klaster Industri	2 Klaster Industri	39.405.000,00	2 Klaster Industri	100,00	34.935.000,00	88,66
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keikutsertaan pada Pameran Luar Daerah Dalam Provinsi, Pameran Luar Daerah Luar Provinsi dan Pameran Dalam Daerah	18 kali	61.620.000,00	34 kali	188,89	58.969.984,00	95,70
5	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.536.500,00	1 Laporan	100,00	3.205.000,00	90,63
2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (%)	60%	11.890.000,00	-	75,00	5.987.500,00	50,36
II. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi IUI	4 Rekomendasi	11.890.000,00	-	75,00	5.987.500,00	50,36
6	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi IUI	4 Rekomendasi	6.425.000,00	2 Rekomendasi	50,00	2.915.000,00	45,37
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	4 Laporan	5.465.000,00	4 Laporan	100,00	3.072.500,00	56,22
3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Fasilitasi Tahapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	60%	69.598.532,00	-	71,75	46.514.600,00	66,83
III. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Data Industri	1 Dokumen	69.598.532,00	-	71,75	46.514.600,00	66,83
8	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM	3378 IKM	69.598.532,00	4.719 IKM	71,75	46.514.600,00	66,83
		Jumlah Industri Besar	50 IB		59 IB			
JUMLAH				420.486.529,00	-	107,01	373.922.584,00	88,93

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Promosi Produk IKM, kami memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2022 adalah sbb :

Tabel 3.22
Rekafitulasi Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2022
Pada Dekranasda dan Pusat Promosi

NO	BULAN	DEKRANASDA (Rp)	PUSPRO (Rp)
1	JANUARI	12.174.000	7.258.000
2	FEBRUARI	12.519.000	5.017.000
3	MARET	14.057.000	9.748.000
4	APRIL	18.666.000	11.258.000
5	MEI	17.153.000	12.746.000
6	JUNI	21.576.000	22.452.000
7	JULI	22.862.000	33.478.000
8	AGUSTUS	18.631.000	23.637.000
9	SEPTEMBER	19.294.000	17.382.000
10	OKTOBER	65.783.000	21.223.000
11	NOVEMBER	26.536.000	12.330.000
12	DESEMBER	20.123.000	27.366.000
		269.374.000	203.895.000

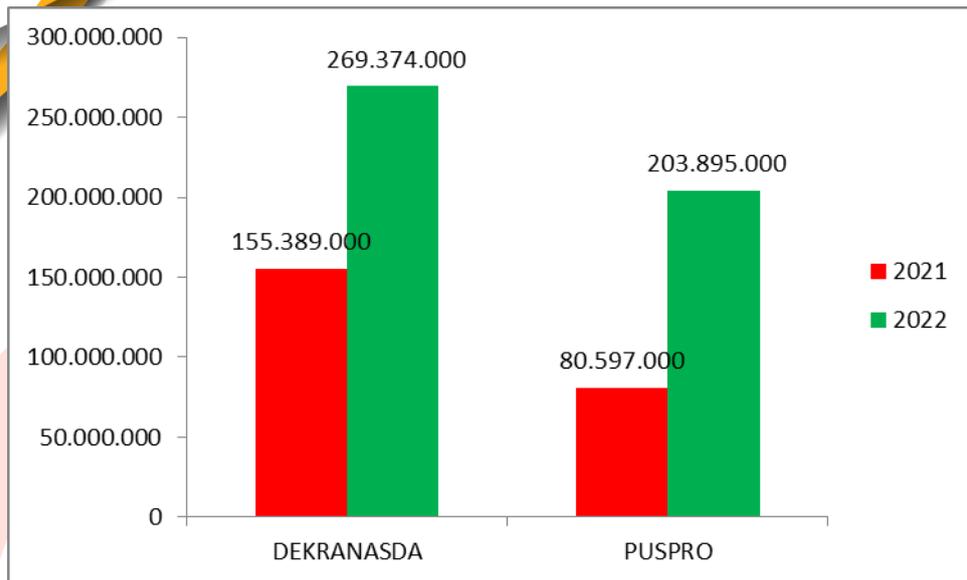
Pada Tahun 2022, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 22.447.833/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 16.991.250/bulan. Sedangkan di tahun 2021, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 12.950.000/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 6.716.000/bulan.

Berikut Total penjualan di Dekra dan Puspro Tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 100,55 %

disnakerind

Grafik 3.2

Rata – Rata Penjualan Produk IKM Tahun 2022 Pada Dekranasda dan Puspro



Adapun laju pertumbuhan peningkatan jumlah industry selama tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.23

Pertumbuhan Peningkatan Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2022

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Hasil Penjualan Produk IKM (Rp)
1	26 Jan 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Mini Expo di Poltek	Politeknik Tala	632.000
2	14 Mar 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Rapat Koordinasi P3DN	Sarantang Saruntung	1.023.000
3	01 Apr 2022	Mengikuti Kegiatan Pameran Inacraft	Jakarta	-
4	22 Apr 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Gunung Raja	2.840.000
5	29 Apr 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Kait-kait Baru	1.787.000
6	13 Mei 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Batalang	1.086.000

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Hasil Penjualan Produk IKM (Rp)
7	27 Mei 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Sungai Bakau	3.234.000
8	31 Mei 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Rapat Koordinasi APKASI	Rattan Inn Banjarmasin	1.824.000
9	03 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Kuala Tambangan	2.413.000
10	06 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Kunjungan dari Bojonegoro	Sarantang Saruntung	3.116.000
11	10 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Suka Ramah	1.792.000
12	20 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo Pada Pasar Murah di Mesjid Darul Mahabbah	Ds. Liang Anggang	408.000
13	24 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Muara Kintap	3.192.000
14	30 Jun 2022	Melaksanakan Mobil Expo Pada Kick Off P3DN	Sarantang Saruntung	1.341.000
15	01 Jul 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Sungai Jelai	2.069.000
16	04 Jul 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Mobil IP Klinik	Galaksi Hotel Banjarmasin	2.130.000
17	15 Jul 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Tajau Pecah	2.334.000
18	22 Jul 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Pantai Linuh	772.000
19	05 Agt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Handil Suruk	3.655.000
20	12 Agt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Bentok Darat	1.001.000
21	19 Agt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Tajau Mulya	688.000
22	24 Agt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Studi Tiru Posyantek TTG	Ds. Benua Tengah	874.000
23	26 Agt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Asam Jaya	506.000

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Hasil Penjualan Produk IKM (Rp)
24	20 Sep 2022	Mengikuti Pameran Kriya Nusa Tahun 2022	Jakarta	575.000
25	02 Sep 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Sumber Jaya	2.665.000
26	09 Sep 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Tambang Ulang	814.000
27	28 Sep 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Yudisium dan Disnatis Politala	Politeknik Tala	225.000
28	28 Okt 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Banua Lawas	2.441.000
29	04 Nov 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Bawah Layung	1.147.000
30	11 Nov 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Pasir Putih	3.666.000
31	18 Nov 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Gunung Melati	611.000
32	25 Nov 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Handil Labuan Amas	844.000
33	02 Des 2022	Melaksanakan Tala Expo Tahun 2022	Halaman Pertasi Kencana	-
		Tanggal 02 Desember 2022		5.517.000
		Tanggal 03 Desember 2022		3.328.000
		Tanggal 04 Desember 2022		4.000.000
		Tanggal 05 Desember 2022		6.163.000
		Tanggal 06 Desember 2022		3.376.000
34	09 Des 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Sungai Bakar	1.810.000
35	16 Des 2022	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang	Ds. Tanjung Dewa	2.069.000
			Total penjualan	77.968.000

Sedangkan jumlah industri besar, kecil dan Industri Kecil Menengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24

Rekafitulasi Jumlah Industri Besar, Kecil dan IKM Tahun 2022

	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Industri Besar dan menengah	50	59
Jumlah Industri Kecil	3458	4719

B. Sumberdaya Manusia

Bidang Perindustrian Tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 5 (lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 7 (tujuh) orang tenaga PTT serta 3 (tiga) orang Tenaga Ahli. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.25

Sumber Daya Manusia Pada Bidang Perindustrian Tahun 2022

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang	Penata TK.I / III d	1 Orang
2	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Penata / III c	1 Orang
		Penata TK.I / III d	1 Orang
3	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi Industri	Pembina TK.I / IV b	1 Orang
4	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Pengatur TK.I / II d	1 Orang



No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
5	Tenaga Administrasi Penyuluh Perindustrian	PTT	1 Orang
6	Penjaga Showroom Dekranasda	PTT	2 Orang
7	Penjaga Showroom Gedung Pusro	PTT	2 Orang
8	Penjaga Malam Dekranasda	PTT	1 Orang
9	Penjaga Malam Gedung Pusro	PTT	1 Orang
10	Tenaga Ahli Penyuluh Perindustrian	PTT	1 Orang
11	Tenaga Ahli Standarisasi Industri	PTT	1 Orang
12	Tenaga Ahli Promosi berbasis IT	PTT	1 Orang

C. Analisis Kendala

Pada Tahun 2021, seluruh bagian Dunia masih mengalami sebuah pandemi yang sangat berat yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pandemi ini ternyata terus berdampak sepanjang tahun 2022 dan tentu saja berdampak pada perekonomian Indonesia terutama Pariwisata dan Perindustrian. Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya operator Desain Industri di Rumah kemasan untuk membantu IKM meningkatkan penjualan produknya.
2. Tidak adanya mesin dan peralatan serta workshop pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya
3. Tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah



kemasan, baik untuk pembelian mesin peralatan maupun pembangunan workshop.

4. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID) dimana untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2022 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak bisa kami laksanakan. Begitupun dengan fasilitasi hak merek tahun 2022 ini berasal dari dana provinsi sehingga masih banyak IKM yang belum terfasilitasi Hak Merek.
5. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran, sehingga pada tahun ini, kita tidak dapat mengikuti pameran incraft yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia dan berpotensi besar untuk promosi produk.
6. Kurangnya pelatihan softskill yaitu pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk memperlihatkan kembali kemampuan atau minat seseorang yang berasal dari dirinya sendiri, lebih tepatnya disebut dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang.
7. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru

D. Saran

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang



ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan PTT untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan antara lain PTT pada Rumah /TA Kemasan sebagai Desainer Kemasan untuk membantu IKM meningkatkan penjualan produknya.
2. Perlunya mesin dan peralatan serta workshop pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya
3. Mendorong Pemkab dan Pemrov agar Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementerian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
4. Mendorong Bappeda dan TAPD agar Disnakerind mendapatkan alokasi DID yang dapat kami manfaatkan untuk pemulihan ekonomi IKM dan untuk standarisasi produk IKM
5. Kerjasama dengan SKPD lain khususnya terkait promosi produk dan investasi.
6. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.
7. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan

E. Rencana Aksi 2023

Bahwa sesuai dengan saran yang kami ajukan maka kami pada tahun 2023 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan PTT dan Tenaga Ahli untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan;
2. Mengusulkan mesin Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya dengan menggunakan dana DAK.
3. Mengusulkan ke Kementerian Perindustrian mengenai perubahan regulasi mengenai kebijakan Daerah Khusus Pariwisata, sehingga Tanah Laut dapat mendapatkan dana DAK untuk membangun ruang produksi/workshop.
4. Menumbuhkan sentra-sentra Industri Kecil Menengah
5. Mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online.
6. Mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui

Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Tahun 2022 ada 16 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah.

7. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.
8. Mendorong sertifikasi TKDN, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil
9. Penggunaa Aplikasi Sosialita dan EKatalog local dalam belanja pengadaan.
10. Mengaktifkan pelayanan desain produk di Rumah Kemasan.

5. Sasaran 5 (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan , Disnakerind dalam pelayanan public dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya guna meningkatkann kualitas pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Survey kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Disnakerind, mengetahui harapan dan kebutuhan secara



kuantitatif dan kualitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Disnakerind, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pada Disnakerind.

Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind tahun 2022 Disnakerind mendapatkan Nilai 90,34 dengan kategori SANGAT BAIK (A) berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (88,31 – 100). Pada tahun 2021 Disnakerind mendapatkan Nilai 89,59 dengan kategori SANGAT BAIK (A) berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (88,31 – 100).

Salah satu upaya sasaran Perjanjian Kerja sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Disnakerind Tahun 2021, yang berarti meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek –aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun tahun 2022 masih dalam tahapan penilaian namun pada Tahun 2021 Disnakerind memperoleh nilai 94,77 dengan Kategori **Sangat Memuaskan** . Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2020 kategori Baik menjadi Sangat Memuaskan pada Tahun 2021 salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik). Dan Sasaran ini juga dapat dilihat pada pencapaian nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, untuk tahun 2022 (Data tahun 2021) memperoleh nilai 83,20 sedangkan untuk nilai Sakip tahun 2021 (data

tahun 2020) memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik), ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian semakin akuntabel, berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Renja Perubahan 2022, Renja 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2021.

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada Tahun 2022 Disnakerind meluncurkan sebuah Inovasi Baru, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan *Online System Melalui Smart Office, Smart Service (SOSS)* dan *Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)* pada lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan beberapa terobosan untuk meringankan tugas-tugas administratif yang diberikan kepada pegawai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah berbagai proses kegiatan administratif melalui pengembangan alat kerja berbentuk aplikasi berbasis Web dan Android, yaitu Aplikasi **Smart Office – Smart Service (SOSS)**;

Aplikasi *Smart Office – Smart Service (SOSS)*, merupakan alat kerja Sekretariat dalam kegiatan administrasi pemerintahan, sekaligus alat kerja Bidang untuk kegiatan pelayanan publik yang dibangun dalam dua aplikasi berbeda yang terintegrasi (*Dual Sides App System*), yaitu Aplikasi SOSS untuk Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dan Aplikasi SOSS untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan mengusung motto *One Record, One Thousand Reports*.

SOSS adalah Aplikasi berbasis Web (*Web-Based App*) dan Android yang menerapkan sistem aplikasi dua arah (*Dual Sides App System*), yaitu dua aplikasi berbeda yang terintegrasi antara Pegawai DISNAKERIND, dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi Pegawai adalah sebagai alat kerja untuk berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, dan sebagai pengelola (Admin) untuk berbagai layanan publik DISNAKERIND.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mengakses berbagai informasi dan fitur layanan publik berbasis online yang dikembangkan oleh DISNAKERIND.

Registrasi pada Aplikasi SOSS untuk pegawai hanya bisa dilakukan oleh pegawai DISNAKERIND dan UPT BLK dengan merujuk pada data Nomor Identitas PNS, yaitu NIP, dan Nomor Identitas PTT, yaitu NR-PTT.

Sedangkan Registrasi Aplikasi SOSS untuk publik dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan merujuk pada Nomor Identitas Kependudukan.

Otoritas akses Aplikasi SOSS untuk pegawai diatur berdasarkan otoritas tugas dan fungsi jabatannya pada struktur organisasi DISNAKERIND.

Ruang lingkup Aplikasi SOSS untuk pegawai dibagi menjadi dua menu utama yang dibangun sesuai dengan Struktur Organisasi DISNAKERIND, yaitu:

- a. Menu Smart Office untuk alat kerja Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Menu Umum;
 2. Sub Menu Kepegawaian;
 3. Sub Menu Perencanaan; dan
 4. Sub Menu Keuangan
- b. Menu Smart Service untuk alat kerja Bidang terdiri dari:
 1. Sub Menu Bidang P2TK
 2. Sub Menu Bidang HIJSTK
 3. Sub Menu Bidang Perindustrian
 4. Sub Menu UPT BLK

Ruang lingkup Aplikasi SOSS untuk publik terdiri dari tiga menu utama, yaitu:

- a. Menu promosi produk industri lokal di halaman utama;
- b. Menu berita dan informasi ketenagakerjaan dan perindustrian.



Menu Smart Office

(1) Menu Smart Office berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DISNAKERIND, serta Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK.

(2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Office terdiri dari:

a. Sub Menu Umum

1. Aplikasi Register Surat Masuk
2. Aplikasi Register Surat Keluar
3. Aplikasi Register Nota Dinas
4. Aplikasi Register Telaahan Staf
5. Aplikasi Register Rekomendasi
6. Aplikasi Register SK
7. Aplikasi Register SPT dan SPPD (Monas)
8. Aplikasi Register Penggunaan Mobil Dinas dan BBM (Krisna)
9. Aplikasi Register Penggunaan Rumah Dinas BLK

disnakerind

b. Sub Menu Kepegawaian

1. Aplikasi Register Kehadiran Pegawai
2. Aplikasi Data Pegawai
3. Aplikasi Data Jabatan



c. Sub Menu Perencanaan

1. Aplikasi Penyusunan RKA
2. Aplikasi Renja dan Renstra

d. Sub Menu Keuangan

1. Aplikasi Penatausahaan Kinerja dan Keuangan (Si Kijang).

Menu Smart Service

(1) Menu Smart Service berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik pada Bidang P2TK, Bidang HIJSTK, Bidang Perindustrian, dan UPT BLK pada DISNAKERIND.

(2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Service terdiri dari:

1. Sub Menu Bidang P2TK

- a. Aplikasi Pasar Kerja
- b. Aplikasi Karir Hub

2. Sub Menu Bidang HIJSTK

- a. Aplikasi Manajemen Norma Tenaga Kerja.
- b. Aplikasi Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Sub Menu Bidang Perindustrian

- a. Aplikasi Pendataan Industri
- b. Aplikasi Pencatatan Penjualan Dekranasda dan Puspro

4. Sub Menu UPT BLK

- a. Aplikasi Data Peserta Pelatihan
- b. Aplikasi Data Alumni Pelatihan

disnakerind



Menu Aplikasi SALAM.

Adapun menu dan sub menu Aplikasi SALAM terdiri dari :

1. Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :
 - a. Pasar Kerja.
 - b. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.
2. Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja.
 1. SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Norma Kerja).
 2. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.
3. Pelayanan Perindustrian.
 - a. GAYATRI (Gerakan Pemberdayaan Industri).
 - b. Toko Dekranasda.
 - c. Pusat Promosi.
 - d. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.

B. Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan

Pada tahun 2022 unit kerja Sekretariat melaksanakan 1 program, 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu dengan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 9.066.387.077,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.959.187.536,- dengan serapan sebesar Rp. 7.096.977.325,- atau

79,21%, yang mana pada kegiatan fisiknya telah terealisasi sebesar 82%.

Sedangkan pada tahun 2021 kesekretariatan merealisasikan anggaran sebesar Rp. **6.553.312.899,-** atau 66% dari pagu sebesar Rp.

9.876.109.723,- dengan realisasi kegiatan fisiknya sebesar 97%. Adapun

realisasi keuangan dan fisik pada kesekretariatan dapat lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pada Sasaran 5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2021 (Rp)	Realisasi (%)			
				Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	80 Nilai	9.876.109.723	87,72	109	6.553.312.899	66
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	71.755.537	12 Bulan	83	43.623.950	61
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	9.999.700	3 Dokumen	100	6.793.700	68
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	34.999.676	5 Laporan	100	31.830.250	91
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2 Pameran	26.756.161	1 Pameran	50	5.000.000	19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	8.688.674.049	1 Tahun	100	5.481.900.082	63
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	50 Orang	8.632.506.573	38 Orang	100	5.430.499.632	63
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen	56.167.476	1 Dokumen	100	51.400.450	92
	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi BMD	1 Tahun	74.934.258	1 Tahun	97	70.756.750	94
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penjamin BMD	6 Jenis	74.934.258	1 Jenis	97	70.756.750	94
	Jumlah Orang	3 Orang		3 Orang			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	1 Tahun	39.485.160	1 Tahun	100	39.465.400	100
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	91 Stel	39.485.160	91 Stel	100	39.465.400	100
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	8 Orang/Tahu	-	-	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	310.716.900	1 Tahun	87	289.629.670	93
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	178 Buah	12.319.400	178 Buah	100	12.277.900	100
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	19 Jenis	42.303.700	19 Jenis	100	35.678.595	84
	Jumlah Jenis Peralatan & Perlengkapan Kantor	4 Jenis		4 Jenis			

disnakerind

11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	10.949.800	4 Jenis	100	9.343.500	85
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	6.965.600	1 Jenis	31	1.800.000	26
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	278 Tamu	23.183.400	263 Tamu	95	22.008.400	95
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	295 Orang/Kali	214.995.000	288 Orang	98	208.521.275	97
	Jumlah Peserta Rapat	500 Orang		488 Orang			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan BMD SKPD	1 Tahun	141.751.720	1 Tahun	100	134.581.363	95
15. Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel	6 Buah	45.148.620	6 Buah	100	44.000.000	97
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	96.603.100	24 Buah	100	90.581.363	94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	1 Tahun	253.151.668	1 Tahun	112	207.372.486	82
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Orang	3 Orang	28.433.076	3 Orang	148	25.637.701	90
	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1500 Surat		2225 Surat			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi	2 Unit	187.895.916	2 Unit	100	145.241.435	77
	Jumlah Jenis Jasa	6 Jenis		6 Jenis			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi)	3 Aplikasi/Tahun	5.445.000	3 Aplikasi/Tahun	100	5.280.000	97
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	16 Jenis	31.377.676	16 Jenis	100	31.213.350	99
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD	1 Tahun	295.640.431	1 Tahun	99	285.983.197	97
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	8 Unit	109.673.376	7 Unit	97	106.616.300	97
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit		3 Unit			
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	4 Jenis	22.445.000	4 Jenis	100	19.600.000	87
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	1 Buah	143.281.115	1 Buah	100	140.936.237	98
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	1 Buah	20.240.940	1 Buah	100	18.830.660	93
			9.876.109.723	-	97	6.553.312.899	66

B. Sumber Daya Manusia

Kesekretariatan Tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 17 (tujuh belas) orang personil yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Pegawai Megeri Sipil dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Tidak Tetap/ PTT. Ditambah Tenaga Ahli 1 (satu) orang. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Sekretaris	Pembina / IV a	1 Orang
2	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	Penata / III c	1 Orang
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I / III d	1 Orang
4	Analisis Tata Laksana	Pembina Muda Tk I / III b	1 Orang
5	Bendahara	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
6	Pengelola Keuangan	Penata Muda / III a	1 Orang
7	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
8	Pengadministrasi Umum	PTT	1 Orang
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	PTT	1 Orang
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	PTT	1 Orang
11	Pengelola Gaji	PTT	1 Orang
12	Petugas Kebersihan	PTT	1 Orang
13	Petugas Jaga Malam	PTT	4 Orang

C. Analisis Kendala

Beberapa Kendala yang dihadapi dan menjai tanggungjawab di Kesekretariatan adalah :

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
3. Tidak adanya Tenaga ASN sebagai Verifikator



4. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

B. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Gedung Kantor yang lebih representatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3. Penambahan Tenaga PNS untuk mengoptimalkan kinerja layanan pada sekretariat dan bidang (minimal 75% dari 110 orang yang ada dalam peta jabatan)
4. Penambahan pagu anggaran dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

E. Rencana Aksi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Meminta pembangunan Gedung Kantor yang lebih representatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada.
2. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan melalui

pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.

3. Meminta Penambahan Tenaga PNS pada BKPSDM untuk mengoptimalkan kinerja layanan pada sekretariat dan bidang (minimal 75% dari 110 orang yang ada dalam peta jabatan)
4. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan.

2. Eselon III (Sekretaris).

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Pada Sekretaris

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	1 Nilai Sakip Disnakerind	BB	A	A	100%	A	100%
		2 Nilai Reformasi Birokrasi	A	AA	AA	100%	AA	100%

Sasaran I (Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja)

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai daripada Sakip Disnakerind dan Nilai Reformasi Birokrasi.

Untuk Nilai Sakip tahun 2022 memperoleh nilai 83,20 dengan kategori A, (Memuaskan) hal ini sesuai dengan yang ditargetkan yaitu kategori A, sedangkan untuk nilai SAKIP tahun 2021 memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik). Meningkatkan nilai SAKIP pada tahun 2022 hal

ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian semakin akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan datar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Renja Perubahan 2021, Renja 2022, Pencapaian Kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2022.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun tahun 2022 (data tahun 2021)

Disnakerin memperoleh nilai 94,77 dengan kategori **Sangat Memuaskan** sedangkan pada Tahun 2021 (data tahun 2020) Disnakerind memperoleh nilai 68,7 dengan Kategori **Baik** . Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2021 dari kategori baik menjadi sangat Istimewa pada Tahun 2022 salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik).

Dan Sasaran ini juga dapat dilihat pada pencapaian nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, untuk tahun 2022 (Data tahun 2021) memperoleh nilai 83,20 sedangkan untuk nilai Sakip tahun 2021 (data tahun 2020) memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik), ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian semakin akuntabel, berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Capaian Realisasi Keuangan

Pada tahun 2022 unit kerja Sekretariat melaksanakan 1 program, 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu dengan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 9.066.387.077,- setelah perubahan menjadi Rp. 8.959.187.536,- dengan serapan sebesar Rp. 7.096.977.325,- atau 79,21%, yang mana pada kegiatan fisiknya telah terealisasi sebesar 82%. Sedangkan pada tahun 2021 kesekretariatan merealisasikan anggaran sebesar Rp. **6.553.312.899,-** atau 66% dari pagu sebesar Rp. **9.876.109.723,-** dengan realisasi kegiatan fisiknya sebesar 97%. Adapun realisasi keuangan dan fisik pada kesekretariatan dapat lihat pada tabel dibawah ini :

disnakerind

Tabel 3.29

Realisasi Keuangan dan Fisik Pada Sekretariat

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	76,61 Nilai	8.958.187.536,00	-	82,00	7.096.977.325,00	79,21
	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	10.200.671,00	1 Tahun	100,00	9.274.125,00	90,92
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	4.084.256,00	6 Dokumen	100,00	3.713.250,00	90,92
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan	3 Dokumen 2 Laporan	6.116.415,00	3 Dokumen 2 Laporan	100,00	5.560.875,00	90,92
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.786.802.243,00	12 Bulan	100,00	6.061.178.110,00	77,84
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bulan	7.781.334.018,00	12 Bulan	100,00	6.056.111.310,00	77,83
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	5.468.225,00	1 Dokumen 4 Laporan	100,00	5.066.800,00	92,66
	III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	10.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	2 Orang	10.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00
	IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	247.954.528,00	1 Tahun	103,62	232.746.380,00	93,87
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis 94 Buah	7.991.282,00	10 Jenis 94 Buah	100,00	6.941.200,00	86,86
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK (bahan kegiatan kantor) Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor	19 Jenis 4 Jenis	41.042.895,00	19 Jenis 4 Jenis	100,00	36.260.100,00	88,35
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan	4 Jenis 67778 Lembar	35.087.910,00	4 Jenis 67778 Lembar	100,00	32.095.400,00	91,47
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis percetakan Jumlah Jenis Bacaan Perundang-Undangan	50 Buku 1 Jenis	3.480.000,00	50 Buku 1 Jenis	100,00	2.160.000,00	62,07
	10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas Jumlah Tamu yang difasilitasi	3 Jenis 316 Tamu	9.134.875,00	2 Jenis 316 Tamu	90,00	6.905.000,00	75,59
	11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lokasi Perjalanan Dinas Jumlah Perjalanan Dinas	11 Jenis 156 Orang	151.217.566,00	11 Jenis 195 Orang	131,74	148.384.680,00	98,13
	V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	60.466.538,00	22 Buah	91,67	54.749.796,00	90,55
	12. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	1 Jenis	14.756.225,00	1 Jenis	100,00	13.414.750,00	90,91
	13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	5 Jenis	45.710.313,00	5 Jenis	100,00	41.335.046,00	90,43
	VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis	16 Jenis	709.842.561,00	16 Jenis	97,43	613.623.564,00	86,45
	14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik	4 Jenis	175.216.513,00	4 Jenis	100,00	87.108.759,00	49,71
	15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Sistem Informasi	20 Unit 6 Jenis	31.115.000,00	18 Unit 6 Jenis	92,31	26.350.000,00	84,69
	16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Jumlah Dokumen TU BMD Jumlah PTT Jumlah TI	373 Buah 2 Dokumen 18 Orang 2 Orang	503.511.048,00	373 Buah 2 Dokumen 18 Orang 2 Orang	100,00	500.164.805,00	99,34
	VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan BMD	1 Dinas	133.920.995,00	1 Dinas	81,25	125.405.350,00	93,64
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	8 Unit 2 Unit	65.000.000,00	8 Unit 2 Unit	100,00	63.744.400,00	98,07
	18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang Jumlah Peralatan Mesin	4 Jenis 4 Unit	9.650.000,00	1 Jenis 1 Jenis	25,00	6.455.000,00	66,89
	19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Jumlah Material Bangunan Jumlah Orang	12 Jenis 302 Buah 7 Orang	49.447.995,00	12 Jenis 302 Buah 7 Orang	100,00	45.382.950,00	91,78
	20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Jumlah Kegiatan	1 Jenis 1 Kegiatan	9.823.000,00	1 Jenis 1 Kegiatan	100,00	9.823.000,00	100,00
	JUMLAH			8.959.187.536,00	-	82,00	7.096.977.325,00	79,21



Permasalahan

disnakerind

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
3. Tidak adanya Tenaga ASN Pengelola Gaji.
4. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Rencana aksi 2023

1. Melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek –aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance.
2. Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 Disnakerind memperoleh nilai 94,77 dengan Kategori BAIK. Meningkatnya Nilai RB dari kategori sangat istimewa menjadi sangat BAIK salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik).
3. Mengusulkan Penambahan SDM guna peningkatan Kualitas dan kuantitas kinerja terutama Pengelola Gaji pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
4. Mengusulkan penambahan perluasan gedung guna peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor untuk memaksimalkan pelayanan public terhadap masyarakat yakni pembangunan Gedung Kantor yang lebih representatif dalam memberikan pelayanan di Bidang



Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada.

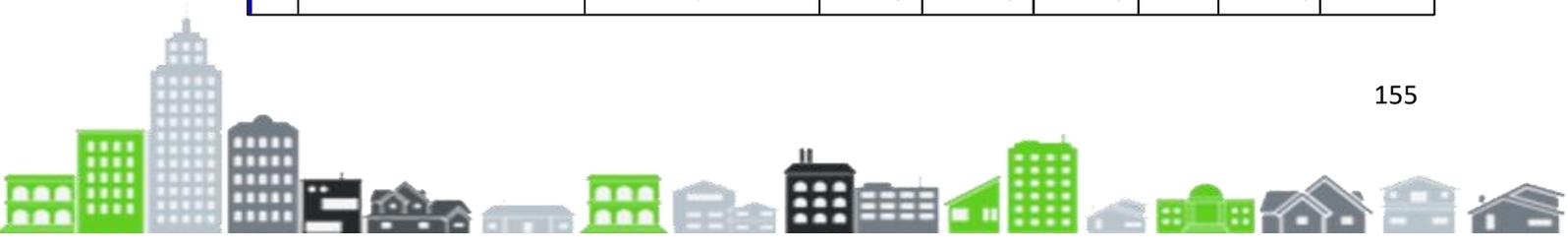
5. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang melalui pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.
6. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Adapun realisasi kinerja berdasarkan kinerja utama pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Pada Subbag Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jumlah Orang	0	2 Orang	-	0%	36 Orang	
2	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	178 Buah	94 Buah	94 buah	100%		
		2 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	19 Jenis dan 4 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	35 Jenis	
		3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	2 jenis			
		4 Jumlah jenis cetak dan penggandaan	-	67778 Lembar	67778 lbr	100%		
		5 Jumlah jenis Percetakan	-	50 Buku	50 buku			
		6 Jumlah Jenis Bahan bacaan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%		
		7 Jumlah jenis fasilitasi		3 Jenis	2 Jenis	74,37%		
		8 Jumlah Tamu yang difasilitasi	263 Tamu	316 Tamu	316 Tamu	100%		
		9 Jumlah Lokasi perjalanan dinas	-	11 Jenis	11 Jenis			
		10 Jumlah Perjalanan Dinas	288 rang	150 Orang	195 Orang	100%		7400 Orang



3	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Meubel	6 Buah	1 Jenis	1 Jenis	100%	7 Jenis	
		2 Jumlah Sarpras Gd Kantor	24 Buah	3 Jenis	3 Jenis	100%		
4	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik	6 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	100%	16 Jenis	
		2 Jumlah Unit	-	20 Unit	18 Unit			
		3 Pemeliharaan Sistem Informasi	3 Aplikasi	6 Jenis	6 Jenis	100%		
		4 Jumlah alat kebersihan	16 jenis	373 Buah	373 buah			
		5 Jumlah Dokumen TU BMD	-	2 Dokumen	2 Dokumen			
		6 Jumlah PTT	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100%		
		7 Jumlah TA	2 Orang	2 Orang	2 Orang			
5	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	1 Jumlah Kendaraan dinas Roda 2	7 Unit	8 Unit	7 Unit	95%	16 Jenis	
		2 Jumlah Kendaraan dinas Roda 4	3 Unit	2 Unit	2 Unit			
		3 Jumlah Jenis Barang	4 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	25%		
		4 Jumlah Peralatan mesin	-	4 Unit	1 Unit			
		5 Jumlah jenis	-	12 Jenis	12 Jenis			
		6 Jumlah Material bangunan	-	302 Buah	302 Buah	100%		
		7 Jumlah Orang	-	7 Orang	7 Orang			
		8 Jumlah jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100%		
		9 Jumlah kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Jenis	100%		

Capaian

Pada tahun 2022 Subbag Umum dan Kepegawaian melaksanakan 1 program, 5 kegiatan dan 16 Sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.162.184.622,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.026.525.090,- atau 88,33%, sedang untuk realisasi fisiknya mencapai 79,64%, untuk lebih rincinya realisasi keuangan dan capaian fisiknya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.31
Realisasi Keuangan dan Fisik Pada Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	76,61 Nilai	-	-	-	-	-
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	10.000.000,00	-	0,00	0,00	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	2 Orang	10.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	247.954.528,00	1 Tahun	103,62	232.746.380,00	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi	10 Jenis	-	10 Jenis	-	-	-
		Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	94 Buah	7.991.282,00	94 Buah	100,00	6.941.200,00	86,86
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK /bahan kegiatan kantor	19 Jenis	-	19 Jenis	-	-	-
		Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor	4 Jenis	41.042.895,00	4 Jenis	100,00	36.260.100,00	88,35
		Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor	2 Pameran	-	2 Pameran	-	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	-	4 Jenis	-	-	-
		Jumlah jenis cetak dan penggandaan	67778 Lembar	35.087.910,00	67.778 Lembar	100,00	32.095.400,00	91,47
		Jumlah jenis percetakan	50 Buku	-	50 Buku	-	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan Perundang-Undangan	1 Jenis	3.480.000,00	1 Jenis	100,00	2.160.000,00	62,07
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas	3 Jenis	9.134.875,00	2 Jenis	90,00	6.905.000,00	75,59
		Jumlah Tamu yang difasilitasi	316 Tamu	-	316 Tamu	-	-	-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lokasi Perjalanan Dinas	11 Jenis	151.217.566,00	11 Jenis	131,74	148.384.680,00	98,13
		Jumlah Perjalanan Dinas	156 Orang	-	195 Orang	-	-	-
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	60.466.538,00	24 Buah	91,67	54.749.796,00	-
8	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	1 Jenis	14.756.225,00	1 Jenis	100,00	13.414.750,00	90,91
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	5 Jenis	45.710.313,00	5 Jenis	100,00	41.335.046,00	90,43
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis	16 Jenis	709.842.561,00	16 Jenis	97,43	613.623.564,00	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik	4 Jenis	175.216.513,00	4 Jenis	100,00	87.108.759,00	49,71
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	20 Unit	31.115.000,00	18 Unit	92,31	26.350.000,00	84,69
		Pemeliharaan Sistem Informasi	6 Jenis	-	6 Jenis	-	-	-
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan	373 Buah	-	373 Buah	-	-	-
		Jumlah Dokumen TU BMD	2 Dokumen	503.511.048,00	2 Dokumen	100,00	500.164.805,00	99,34
		Jumlah PTT	18 Orang	-	18 Orang	-	-	-
		Jumlah TI	2 Orang	-	2 Orang	-	-	-
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan BMD	1 Dinas	133.920.995,00	1 Dinas	81,25	125.405.350,00	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	8 Unit	65.000.000,00	8 Unit	100,00	63.744.400,00	98,07
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit	-	2 Unit	-	-	-
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang	4 Jenis	9.650.000,00	1 Jenis	25,00	6.455.000,00	66,89
		Jumlah Peralatan Mesin	4 Unit	-	1 Jenis	-	-	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	12 Jenis	49.447.995,00	12 Jenis	100,00	45.382.950,00	91,78
		Jumlah Material Bangunan	302 Buah	-	302 Buah	-	-	-
		Jumlah Orang	7 Orang	-	7 Orang	-	-	-
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	1 Jenis	9.823.000,00	1 Jenis	100,00	9.823.000,00	100,00
		Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	-
	JUMLAH			1.162.184.622,00		88,33	1.026.525.090,00	79,64

a. Kurangnya SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sehingga perlu kerja maksimal dengan beban kerja yang tinggi.

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Rencana Aksi 2023

a. Untuk melaksanakan kegiatan dengan Penerapan E-Government dengan system pemerintah berbasis elektronik (SPBE) program/kegiatan bisa dilaksanakan secara online.

b. Mengusulkan penambahan PNS yang sesuai dengan Peta Jabatan yang masih belum terisi.

c. Mengusulkan kembali pembangunan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan terhadap masyarakat.

2) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)

Tabel 3.32
Capaian Kinerja pada Subbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran, dan Ealuasi Kinerja SKPD yang Akuntabel	1 Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	30 Dokumen	80%
		2 Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	10 Laporan	80%
		3 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15 Dokumen	80%
2.	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	60 Bulan	80%
		2 Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan	1 Dokumen & 4 Laporan	1 Dokumen & 4 Laporan	1 Dokumen dan 4 laporan	100%	5 Dokumen & 20 Laporan	80%



Capaian

disnakerindonesia

Bagian Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022 melaksanakan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 6 Dokumen dan mampu tercapai 100 % dengan output Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2022.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 3 Dokumen dan 2 Laporan, mampu tercapai 100 % dengan output 3 Dokumen yaitu Lkj, LKPD dan LPPD Tahun 2022 serta 2 Laporan yaitu Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Statistik Bulanan Tahun 2022.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 12 Bulan dengan jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya tercapai 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output 1 Buah Dokumen CALK Tahun 2021 dan 4 Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan



Untuk anggaran dan realisasi fisik serta keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Realisasi Keuangan dan Fisik Pada Subbag Perencanaan dan Keuangan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	76,61 Nilai		-			
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	10.200.671,00	1 Tahun	100,00	9.274.125,00	90,92
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	4.084.256,00	6 Dokumen	100,00	3.713.250,00	90,92
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	6.116.415,00	3 Dokumen	100,00	5.560.875,00	90,92
		Jumlah Laporan	2 Laporan		2 Laporan			
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.786.802.243,00	12 Bulan	100,00	6.061.178.110,00	77,84
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bulan	7.781.334.018,00	12 Bulan	100,00	6.056.111.310,00	77,83
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5.468.225,00	1 Dokumen	100,00	5.066.800,00	92,66
		Jumlah Laporan	4 Laporan		4 Laporan			
	JUMLAH			7.797.002.914,00		100,00	6.070.452.235,00	84,38

Permasalahan

1. Tidak adanya Tenaga Pengelola Gaji
2. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sehingga sedikit menyulitkan dalam proses perencanaan dan pencapaian target kinerja Renstra dan Renja yang sudah ditetapkan.

Rencana Aksi

1. Mengusulkan Penambahan SDM guna peningkatan Kualitas dan kuantitas kinerja terutama Pengelola Gaji pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
2. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-



3) Eselon IV (Kepala Subbag Tata Usaha BLK)

Tabel 3.34

Capaian Kinerja Pada Subbag Tata Usaha BLK

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	6 Jenis	4 Jenis	4 jenis	100%	38 Jenis	38 Jenis
		2 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	27 Jenis	11 Jenis	11 jenis	100%		
		3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	75,43%		
		4 Jumlah Tamu	82 Orang	160 Orang	80 orang	100%		
		5 Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan Dinas	75 Orang	50 Orang	62 orang	89%		
2	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Mebeleur	4 Jenis	1Jenis	1 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis
		2 Jumlah Perlengkapan	2 Jenis	1 Jenis	-	100%		
3	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Jenis Jasa komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	6 Jenis	3 jenis	67,6%		
		2 Jumlah Dokumen TU BMD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
		3 Jumlah Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100%		
		4 Jumlah PTT	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100		
		5 Jumlah Surat Masuk dan Keluar	300 Surat	150 Surat	172 Surat	100%		
		6 Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	-	4 Jenis	1 jenis	66,76%		
4	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	1 Jumlah jasa/unit pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	1 Unit	1 unit	75%	60 Jenis	60 Jenis
		2 Jumlah Jenis Peralatan Kerja	4 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	45		
		3 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Gedung dan 5 Unit	1 Buah	1 buah	100		
		4 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gd kantor	11 Jenis	12 Jenis	12 jenis	100		



Pada Subbag Tata Usaha BLK pada tahun 2022 melaksanakan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebagai berikut :

- a) Untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi : 1) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar 100%, 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%, 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75,43%, 5) Fasilitas Kunjungan Tamu 100% dan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 88,75% pada Tahun 2022 sedangkan tahun 2021 tercapai 96,54%.
- b) Pengadaan barang milik daerah terdiri dari pengadaan mebel tercapai 100% dan pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar 100% dan pada tahun 2021 tercapai 100%.
- c) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah meliputi : 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 67,61%, 2) Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 100%, 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tercapai 100%, dan pada Tahun 2021 tercapai 100%.
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk 1) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan tercapai 57,06%, 2) pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tercapai 45,16%, 3) Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya tercapai 100% dan 4) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100%.



Kegiatan yang ada pada Balai Latihan Kerja Tahun 2022 dengan Jumlah Pagu Rp. 365.216.980,- dengan 1 program 4 kegiatan 14 sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 313.814.960,- atau 85,93%. Pada Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 75,43%, dimana pagunya sebesar Rp. 2.650.000,- realisasi keuangan Rp. 1.998.800,- secara fisik realisasi 75,43%, pada penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD tercapai 88,75% dimana pagunya sebesar Rp. 20.700.000,- realisasi keuangan Rp. 18.370.400,- secara fisik realisasi 89%, pada jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 67,61% dimana pagunya sebesar Rp. 79.794.725,- realisasi keuangan Rp. 53.951.745,- secara fisik realisasi 60%, pada penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan tercapai 57,06% dimana pagunya sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi keuangan Rp. 14.265.200,- secara fisik realisasi 75%, pada pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 45,16% dimana pagunya sebesar Rp. 4.650.000,- realisasi keuangan Rp. 2.100.000,- secara fisik realisasi 33%.

Rencana Aksi 2023

Dalam melakukan penghitungan pagu/anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan apabila ternyata ada kelebihan anggaran bisa di pergunakan untuk kegiatan yang prioritas.



Tabel 3.35

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	66,19%	65%	38,65%	59,46%	75,0%	51,53%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	7,29%	6%	19,23%	320,50%	6,5%	295,84%

Indikator I (Persentase Peserta Latih yang Kompeten)

Penjelasan Indikator Persentase Peserta Latih yang Kompeten.

Rumus :

$$PK = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

Keterangan:

PK : Peserta yang Kompeten

a : Jumlah Peserta Latih yang Lulus Uji Kompetensi

b : Jumlah Latih Seluruh Paket Kejuruan

Pada tahun 2022 realisasi capaian persentase peserta latih yang kompeten adalah 0,17%. Angka 0,17% tersebut masih dibawah angka realisasi capaian tahun 2021 yaitu 38,65%, dimana pada tahun 2021 pembagi adalah jumlah peserta latih yang terdaftar pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, sedangkan pada tahun 2022 pembagi dari peserta latih yang kompeten adalah jumlah Angkatan kerja pada tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut,

Imbas atau efek dari New normal, pasca Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 masih berdampak pada paket pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari, maupun yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas serta di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta, dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Ketenagakerjaan RI dan juga paket pemagangan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan paket kegiatan pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun 2021.

Angka capaian tahun 2022 terhadap target akhir renstra sebesar **0,17%** ini menggambarkan masih banyak Angkatan kerja yang didalamnya terdapat peserta Pelatihan Berbasis Pemagangan (PBK) maupun Pemagangan Berbasis Pengguna yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut Tes Uji Kompetensi (UJK). Sebagai gambaran, dari 184.133 orang Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut, 975 diantaranya adalah peserta pelatihan dan pemagangan, dan sejumlah 304 orang yang mengikuti dan lulus tes uji kompetensi. Hal ini disebabkan biaya tes uji kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bekasi,



bersumber dari APBN termasuk dana yang difocusing oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, sementara APBD Kabupaten Tanah Laut **tidak** menyediakan dana pendampingan untuk tes uji kompetensi peserta pelatihan dan pemagangan

Kendala

Akibat terbatasnya dana anggaran APBN dan APBD dalam mengalokasikan dana kegiatan tes uji kompetensi bagi peserta pelatihan maupun pemagangan *menyebabkan mereka tidak memiliki sertifikat kemampuan kompetensi keterampilan dirinya setelah mengikuti pelatihan maupun pemagangan*. Padahal sertifikat ini merupakan bukti otentik bagi peserta untuk masuk ke dunia kerja bahwa dia kompeten pada keterampilan atau jurusan pelatihan yang diikutinya sebagai salah satu bukti kemampuan diri untuk memasuki dunia kerja.

Rencana aksi.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan ketiadaan dana tes uji kompetensi, maka ***Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dapat menyediakan dana/anggaran tes uji kompetensi*** sebagai dana pendampingan pelatihan yang dibiayai oleh APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

Pada Bab 6 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendorong



kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan

disnakerind sebagai berikut:

1. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
2. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
3. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
4. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
6. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
7. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
8. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
9. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru



(penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun

pekerja ter-PHK; Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi

10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
11. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
13. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
14. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.

Indikator II (Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan)

Penjelasan Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Rumus indikator adalah besaran dari tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.

Rumus :

$$\text{Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan} = \frac{\Sigma a}{\Sigma b} \times 100\%$$

Keterangan:

Capaian

Dibandingkan TKK pada tahun 2022 dengan TKK tahun 2021 terjadi penurunan kesempatan kerja dimana pelayanan penempatan tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (pada sektor formal) adalah 19,23 persen yaitu dari 220 orang dari 1.144 orang pencari kerja pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam jumlah pencari kerja terdaftar yaitu 889 orang dan yang ditempatkan adalah 119 orang pada tahun 2022 atau dengan persentase sebesar 13,38%. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2022, angka capaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Layanan Antar Kerja sebesar 19,23% meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 7,29%. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Data ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal pada tahun 2022 dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan tren peningkatan ini antara lain adanya pejabat fungsional pengantar kerja sebanyak satu orang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sehingga fungsi perantara kerja mulai berjalan sebagaimana mestinya.





Adanya pejabat fungsional pengantar kerja yang pada tahun sebelumnya ditempatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka memperlancar proses kegiatan yang berkaitan dengan pencari kerja, yang dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, dan pencari kerja ditempatkan mulai mengalami peningkatan. Namun walaupun terjadi peningkatan besaran penempatan di sektor formal, akan tetapi kepatuhan/kewajiban perusahaan mengenai pelaporan lowongan kerja juga perlu ditekankan/di dorong lebih jauh. Penyampaian lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, akan membantu tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan informasi yang disebarluaskan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui media online (medsos) maupun media offline (papan pengumuman lowongan kerja).

2. Salah satu upaya yang dilakukan Kabupaten Tanah Laut untuk memperluas akses para pencari kerja terhadap lapangan kerja adalah dengan menyelenggarakan bursa kerja. Pada periode tahun 2014-2020, penyelenggaraan bursa kerja swasta (Bursa Kerja Khusus/BKK) di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dua tahun saja, yakni sebanyak satu kali pada tahun 2016 dan tujuh kali pada tahun 2017. Sedangkan, untuk penyelenggaraan bursa kerja pemerintah belum ada.



- 1) Mendorong perusahaan untuk menyampaikan lowongan kerja dengan terbitnya peraturan Bupati Tanah Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja **pasal 38 ayat (1)** bahwa “Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja **wajib** menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system kepada Dinas setempat”. **Pasal 38 ayat (3)** dijelaskan bahwa “Bukti Lapor Lowongan pekerjaan adan/atau bukti wajib lapor ketenagakerjaan akan menjadi pemenuhan komitmen bagi perusahaan yang ingin memperoleh layanan perizinan pada instansi yang berwenang di bidang perizinan”. *Hal ini akan mengoptimalkan system informasi pasar kerja (IPK) daerah dimana terjadi proses penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja.*
- 2) Mendorong penempatan yang dilakukan di Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja, serta di Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (peraturan Bupati Tanah Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018)

1) **Eselon IV (Kepala UPT. BLK)**

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Kepala UPT BLK

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	500 orang	500 orang	112 orang	100%	2.500 orang	100,00%



Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja pada tahun 2022 mencapai 100% dengan target 112 orang dengan pelatihan sebanyak 7 paket sedangkan sebelumnya tahun 2021 target 500 orang dan tercapai 100% dengan pelatihan sebanyak 26 paket.

Permasalahan/ Kendala

Kegiatan yang ada pada Balai Latihan Kerja mengalami dampak Pandemi Covid-19 dimana pagu Anggaran kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi mengalami pengurangan dimana pada awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.030.000.000,- dengan target 7 Paket yang kemudian menjadi Rp. 299.629.700,- .

Rencana Aksi

Mengajukan kembali pagu anggaran pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja

3. Eselon III (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek)

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1 Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	100%	27,0%	40%	148%	35%	58,4%



Definisi Rumus

disnakerindonesia

Salah satunya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial sebagai kinerja utama dengan indikator cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama merupakan sasaran strategis dari Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang didapat dari jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dikali 100% :

$$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{jumlah kasus yang difasilitasi}} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

Capaian dan Perbandingan

Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus masuk mampu diselesaikan 4 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama atau capaian sebesar 100% sedangkan ditahun 2021 terdapat 5 kasus masuk dengan 2 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama atau capaian sebesar 40%, berikut dapat dilihat melalui tabel :

Tabel 3.38

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2



Tabel 3.39

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
3	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agrindotama		V		Anjuran Mediator/PHI
4	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Tabel 3.40

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

Tabel 3.41

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Permasalahan atau Kendala

Sebagai bidang yang memiliki 3 (tiga) kegiatan utama yaitu terkait Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang kinerja utama adalah membantu meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta kepatuhan Pelaku HI terhadap Peraturan Per UU, terkait Hubungan Industrial yang kinerja utamanya adalah memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan terkait Persyaratan Kerja yang kinerja utamanya adalah kepatuhan terhadap norma syarat-syarat kerja.

Maka dari kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus pada Bidang Hubungan Industrial diatas dengan didukung sebanyak 4 (empat) orang ASN dibantu dengan 3 (tiga) orang Non ASN layanan yang diberikan masih belum optimal, akan tetapi dalam memberikan pelayanan tetap dengan maksimal walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.

Sedangkan dalam hal anggaran juga Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja diantara bidang yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pagu anggaran yang paling





sedikit, maka kegiatan yang dilaksanakan pun menyesuaikan dengan kendala dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya peraturan perusahaan;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir;
3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial pejabat fungsional mediator perlu segera mendapatkan SK legitimasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator;
4. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik;
5. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini;
6. Pembentukan dan mengoptimalisasian Lembaga Hubungan Industrial seperti Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit.

sejauh yang sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2023 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian terkait untuk segera memfasilitasi mendapatkan SK legitimasi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator;
2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pengesahan peraturan perusahaan yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;
4. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
5. Mengoptimalkan kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut.

6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Kepala Bidang Perindustrian

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	79,23%	130%	134%	103,08%	100%	103%
2.	Menguatnya struktur industri	1. Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	83%	65%	83%	127,69%	65%	196%



1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi jumlah IKM Unggulan
2. Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri

Capaian

1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi jumlah IKM Unggulan = $(134/130) \times 100\% = 103,08\%$
2. Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri = $(5/6) \times 100\% = 83\%$. Adapun 6 tahapan menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 pasal 9 adalah sbb :
 - a. pemilihan lokasi;
 - b. perizinan;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pematangan tanah;
 - e. pembangunan infrastruktur; dan
 - f. pengelolaan.

Permasalahan

Legalitas/perizinan pengelola Kawasan Industri masih berproses di Kementerian ATR/BPN (proses penerbitan PKKPR)



Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk mendorong percepatan penerbitan PKKPR.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 :

Jumlah belanja untuk tahun anggaran 2022 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 10.290.440.542,-** jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program kegiatan dan Sub Kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 19 (sembilan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 8.317.591.389-** atau tercapai **80,83 %**.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat dapat dijelaskan dibawah ini :

A. DINAS

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

i. Sasaran 1 (Meningkatnya daya saing tenaga kerja)

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah proporsi angkatan kerja terhadap

populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara ≤ 15 dan 64 tahun.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 99,72%, dimana dari yang ditargetkan sebesar 71,12% mampu terealisasi sebesar 70,92% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 59.916.340,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.195.550,- atau 87,35%.

Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.43
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 1

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi							



1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari kerja yang mendapat pelatihan/bimbingan	40 orang	9.997.986,-	40 orang	100	8.597.986,-	86
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam FKJP	20 Perusahaan	9.792.542,-	20 Perusahaan	100	7.898.972	81,59
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis	2 Jenis	21.213.220,-	2 Jenis	100	19.230.000,-	90,65
4.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang	20 Orang	11.981.944,-	20 Orang	100	8.916.944	74,42
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil							
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil,	20 Orang	6.930.648,-	15 orang	75	4.460.648,-	64,36

Mikro dan Menengah							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 91,67% dengan realisasi keuangan sebesar 87,35% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	87,35%	91,67%	4,32 %

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja. Peningkatan kesempatan kerja di lihat dari persentase sebesar 96,48% dari target 4%, di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 178.543 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 185.049 orang dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

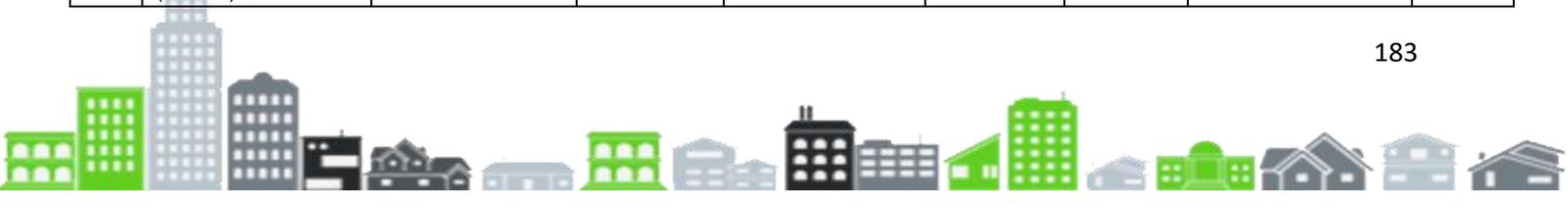
Untuk mendukung capaian sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan capaian tingkat kesempatan kerja sebesar 1742,36%, dimana dari yang ditargetkan sebesar 5,5% mampu terealisasi sebesar 95,83% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 59.916.340,- dengan realisasi sebesar Rp. 137.918.457- atau 98,23%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 2

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penempatan Tenaga Kerja							
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota							
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	35 Orang	51.393.481,-	119 Orang	340	49.831.284,-	96,96
1.2	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat bimbingan dan penyuluhan	20 Orang	9.406.515,-	20 Orang	100	8.504.972,-	90,42
1.3	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang	100 Orang	35.013.152,-	310 Orang	310	34.322.508,-	98,03
2	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1							





	(satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Banyaknya Monitoring LPTKS	ke	4 Kali	2.490.000,-	6 Kali	150	2.400.000	96,39
3	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Purna MPI yang mendapatkan perlindungan		20 PMI Purna	22.029.876,-	20 PMI Purna	100	20.690.579,-	93,92
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja		5,5%					
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan Yang Menyusun Dokumen RTK Mikro		1 Perusahaan	17.585.433,-	1 Perusahaan	100	17.542.957,-	99,76

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 121,77% dengan realisasi keuangan sebesar 98,23% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.46
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	98,23%	121,77%	23,54%

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Disnakerindus Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 40% dari 5 (lima) kasus pada Tahun 2021 menjadi 4 (empat) kasus di tahun 2022.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk capaian pada sasaran 3 diatas didukung dengan Program Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 42.367.500,- atau 87,62% dari pagu sebesar Rp. 48.085.000,- yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 110,05%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 3

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Jumla Peserta BPJS	16.500 Orang	31.735.000,-	19.816 Orang	120,10	27.805.000,-	87,62
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang diisahkan	4 Dokumen	15.175.000,-	17 Dokumen	425	12.445.000,-	82,01



2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	16.500.000,-	-	120,10	15.360.000,-	81,53
		Jumlah Peserta BPJS	16.500 Orang		19.816 Orang			
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan	3 Kasus	16.350.000,-	3 Kasus	100	14.562.000,-	89,07
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	3 kasus	16.350.000,-	3 kasus	100	14.562.000,-	89,07

Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 110,05,43% dengan realisasi keuangan sebesar 87,62% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.48
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	87,62%	110,05%	22,43 %

iv. Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan

naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2021 sebesar 12,56 naik 0,4 poin menjadi 12,60 di Tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh Kinerja Subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk capaian pada sasaran 4 diatas didukung dengan 3 (tiga) program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Bidang Perindustrian dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 373.922.584,- atau 70,67% dari pagu sebesar Rp. 420.486.529,- yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 91,20%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :



disnakerind

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 3

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGE T KINERJ A	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan IKM	6%	338.997.997,-		126,87	321.420.484,-	94,81
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Buku/ Dokumen	105.149.999,-	1 Buku/ Dokumen	100	98.609.000,-	93,78
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi	25 IKM	129.286.498,-	30 IKM	145,45	125.701.500,-	97,23
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan bagi pelaku IKM pangan dan perbengkelan	30 IKM		50 IKM			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Klaster Industri	2 Klaster Industri	39.405.000,-	2 Klaster Industri	100	34.935.000,-	88,66
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							

disnakerind





NO.	KEMUKHAWAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi IUI	4 Rekomendasi	11.890.000,-	2 Rekomendasi	75	5.987.500,-	50,36
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi IUI	4 Rekomendasi	6.425.000,-	2 Rekomendasi	50	2.915.000,-	45,37
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	4 Laporan	5.465.000,-	4 Laporan	100	3.072.500,-	56,22
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri	1 Dokumen	69.598.532,-	1 Dokumen	71,75	46.514.600,-	66,83
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM Jumlah Industri Besar	3378 IKM 50 IB	69.598.532,-	4719 IKM 59 IB	71,75	46.514.600,-	66,83





Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,97% dengan realisasi keuangan sebesar 70,67% menunjukkan efisiensi penggunaan dana tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.50
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	70,67% %	103,97%	39,30%

v. **Sasaran 5 (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat)**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, Disnakerind dalam pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Survey kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Disnakerind, mengetahui harapan dan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Disnakerind, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pada Disnakerind.

Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind tahun 2021 (data tahun 2020) Disnakerind

mendapatkan Nilai 81,59 (data tahun 2020) dengan kategori BAIK berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (76,61 – 88,30). Pada tahun 2022 Disnakerind mendapatkan Nilai 89,59 (data tahun 2021) dengan kategori SANGAT BAIK berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (88,31 – 100).

Salah satu upaya sasaran Perjanjian Kerja sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Disnakerind Tahun 2022, yang berarti meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun tahun 2022 (data tahun 2021) Disnakerind memperoleh nilai 94,77 dengan kategori **AA/Istimewa**. mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 (data tahun 2020) dengan nilai 68,7 dengan kategori **BB/Baik**. Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2021 dari kategori BB menjadi AA pada Tahun 2022 salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik). Dan sasaran ini juga dapat dilihat pada pencapaian nilai Sakip Disnakerind, untuk tahun 2022 (data tahun 2021) memperoleh nilai 83,2 dengan predikat **A/Memuaskan** dibandingkan dengan tahun 2021 (data tahun 2020) memperoleh nilai sakip 76,16 dengan kategori predikat **BB/Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pada tahun 2022 untuk capaian pada sasaran 5 (lima) diatas didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sekretariat dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.096.977.325,- atau 79,21% dari pagu sebesar Rp. 8.989.187.536,- yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 82%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran Pada Sasaran 4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	76,61 Nilai	8.959.187.536,-	-	82,00	7.096.977.325,-	79,21
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	10.200.671,-	1 Tahun	100,00	9.274.125,00	90,92
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	4.084.256,-	6 Dokumen	100,00	3.713.250,00	90,92
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	6.116.415,-	3 Dokumen	100,00	5.560.875,00	90,92
		Jumlah Laporan	2 Laporan		2 Laporan			
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.786.802.243,-	12 Bulan	100,00	6.061.178.110,00	77,84

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bulan	7.781.334.018,-	12 Bulan	100,00	6.056.111.310,00	77,83
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5.468.225,-	1 Dokumen	100,00	5.066.800,00	92,66
		Jumlah Laporan	4 Laporan		4 Laporan			
	III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	10.000.000,-	-	0,00	0,00	0,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	2 Orang	10.000.000,-	-	0,00	0,00	0,00
	IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	247.954.528,-	1 Tahun	103,62	232.746.380,00	93,87
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi	10 Jenis	7.991.282,-	10 Jenis	100,00	6.941.200,00	86,86
		Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	94 Buah		94 Buah			
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK /bahan kegiatan kantor	19 Jenis	41.042.895,-	19 Jenis	100,00	36.260.100,00	88,35
		Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor	4 Jenis		4 Jenis			
		Jumlah belanja/bahan untuk kegiatan kantor Jumlah Pameran	2 Pameran		2 Pameran			
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	35.087.910,-	4 Jenis	100,00	32.095.400,00	91,47

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah jenis cetak dan penggandaan	6778 Lembar		67.778 Lembar			
		Jumlah jenis percetakan	50 Buku		50 Buku			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan Perundang-Undangan	1 Jenis	3.480.000,-	1 Jenis	100,00	2.160.000,00	62,07
	10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas Jumlah Tamu yang difasilitasi	3 Jenis 316 Tamu	9.134.875,-	2 Jenis 316 Tamu	90,00	6.905.000,00	75,59
	11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lokasi Perjalanan Dinas	11 Jenis	151.217.566,-	11 Jenis	131,74	148.384.680,00	98,13
		Jumlah Perjalanan Dinas	156 Orang		195 Orang			
	V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	60.466.538,-	22 Buah	91,67	54.749.796,00	90,55
	12. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	1 Jenis	14.756.225,-	1 Jenis	100,00	13.414.750,00	90,91
	13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	5 Jenis	45.710.313,-	5 Jenis	100,00	41.335.046,00	90,43
	VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis	16 Jenis	709.842.561,-	16 Jenis	97,43	613.623.564,00	86,45
	14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi dan Listrik	4 Jenis	175.216.513,-	4 Jenis	100,00	87.108.759,00	49,71
	15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	20 Unit	31.115.000,-	18 Unit	92,31	26.350.000,00	84,69



NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2022 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeiharaan Sistem Informasi	6 Jenis		6 Jenis			
	16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan	373 Buah	503.511.048,-	373 Buah	100,00	500.164.805,00	99,34
		Jumlah Dokumen TU BMD	2 Dokumen		2 Dokumen			
		Jumlah PTT	18 Orang		18 Orang			
		Jumlah TI	2 Orang		2 Orang			
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan BMD	1 Dinas	133.920.995,-	1 Dinas	81,25	125.405.350,00	93,64
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	8 Unit	65.000.000,-	8 Unit	100,00	63.744.400,00	98,07
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit		2 Unit			
	18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang	4 Jenis	9.650.000,-	1 Jenis	25,00	6.455.000,00	66,89
		Jumlah Peralatan Mesin	4 Unit		1 Jenis			
	19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	12 Jenis	49.447.995,-	12 Jenis	100,00	45.382.950,00	91,78
		Jumlah Material Bangunan	302 Buah		302 Buah			
		Jumlah Orang	7 Orang		7 Orang			
	20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis	1 Jenis	9.823.000,00	1 Jenis	100,00	9.823.000,00	100,00
		Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan			



Dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 82% dengan realisasi keuangan sebesar 79,21% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.52
Efisiensi Anggaran Pada Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <i>menengah</i>	79,21%	82%	2,79 %

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Ringkasan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.53
Ringkasan Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	13.618.390.892	9.597.072.931,98	70,47	10.176.209.186	8.111.554.198	79,71
2.	Belanja Modal	1.776.352.853	1.730.358.823	97,41	114.321.356	103.117.441	90,20
	Jumlah	15.394.743.745	9.597.433.484,98	63,34	10.290.530.542	8.214.671.639	79,83

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah seluruh belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.394.743.745,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 9.597.433.484,98,- atau 63,34% sedangkan tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.290.530.542,- mampu terealisasi sebesar Rp. 8.214.671.639,- jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 14 (empat belas) program yang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 2.979.683.731,- atau tercapai 83,48 %. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Program, Kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

disnakerind



A. DINAS

Tabel 3.54

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	6.793.700	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256	9.274.125



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	34.999.676	31.830.250	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415	3.713.250
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.756.161	5.000.000	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.560.875
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018	6.056.111.310
4	Pengendalian Gaji dan Tunjangan	8.632.506.573	5.430.499.632	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225	5.066.800
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	56.167.476	51.400.450,06	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	74.934.258	70.756.750,18	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6	Penyediaan Komponen Instansi	7.991.282	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	39.485.160	39.465.400	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	41.042.895	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.087.910	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.319.400	12.277.900	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.700	35.678.595	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.134.875	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.949.800	9.343.500	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.217.566	148.384.680
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.965.600	1.800.000	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.183.400	22.008.400	12	Pengadaan Mebel	14.756.225	13.414.750

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
13	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.995.000	208.521.275	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.710.313	41.335.046
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
14	Pengadaan Mebel	45.148.620	44.000.000	14.	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	175.216.513	87.108.759
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.603.100	90.581.363	15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000	26.350.000
VII	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.511.048	500.164.805
16	Penyediaan Surat Menyurat	28.433.076	25.637.701,06	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airt dan Listrik	187.985.916	145.241.435,06	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	65.000.000	63.744.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
					Dinas Operasional atau Lapangan		
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.445.000	5.280.000	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000	6.455.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.377.676	31.213.350,06	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995	45.382.950
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.000	9.823.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaanm, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.673.376	106.616.300,06	B	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
21	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	22.445.000	19.500.000	VIII	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.281.115	140.936.237	21	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433	17.542.957

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.948	18.830.660	C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
B	Program Perencanaan Tenaga Kerja			IX	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
IX	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	9.997.986	8.597.989
24	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49.999.700	40.398.200	23	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542	8.597.989
C	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			24	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220	19.230.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
X	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			X	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
25	Proses pelaksanaa Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Komptensi	399.989.900	379.088.060	25.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	8.916.944
26	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	95.852.800	78.965.900	XI	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648	4.460.648
XI	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			26	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	6.930.648	4.460.648
27	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	D.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
XII	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			XII	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.137.250,06	27	Pelayanan Antar Kerja	51.393.481	49.831.284
D	Program Penempatan Tenaga Kerja			28	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	9.406.515	8.504.972
XIII	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			29	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152	34.322.508
29	Pelayanan Antar Kerja	197.999.376	131.933.066,28	XIII	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
30	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	49.999.700	39.650.900	30	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000	2.400.000
31	Perluasan Kesempatan Kerja	193.167.576	165.903.350,06	XIV	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
XIV	Penerbitan Izin Lkasi Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			31	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876	20.690.576

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
32	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.036.800	2.095.600	E	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
XV	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			XV	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten		
E	Program Hubungan Industrial			32	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000	12.445.000
XVI	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten			33	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000	15.360.000
33	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	62.499.860	50.927.400	XVI	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
					Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
34	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.499.830	17.225.900	34	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartiti Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	14.562.500
XVII	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja			F	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
35	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupten/Kota	98.999.896	81.071.246,06	XVII	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
F	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayan Industri	105.19.999	98.609.000
XVIII	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupetn/Kota			36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498	125.701.500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	76.000.000	31.331.300	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000	34.935.000
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.670.546	353.957.804	38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000	58.969.984
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	788.570.059	627.660.915	39	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500	3.205.000
39	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.484.800	4.581.000	G	PROGRAM PENGENDALIANIZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		
G	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			XVIII	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
					Kewenangan Kabupaten/Kota		
XIX	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupetn/Kota			40	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6425.000	2.915.000
40	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	134.999.750	113.741.400	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.465.000	3.072.500
	JUMLAH	14.657.544.101	10.699.400.029,18	H	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
				XIX	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi untuk IUI,IPUI, IUKI dan		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
					IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
				42	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	69.598.532	46.514.600
					JUMLAH	9.625.593.862	7.695.755.259



Tabel 3.55

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT BLK Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
A	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			A	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah			I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.516.00	5.785.500	1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.690	1.975.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12.858.850	9.576.500	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	2.925.520	2.682.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.428.200	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.650.000	1.998.800
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,132.000	1,080,000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.200.000	3.690.000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000	18.370.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.165.000	84.363.100	II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
II	Administrasi Barasng Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			6	Pengadaan Mebel	8.360.000	8.357.272
7	Pengamanan Barang Milik Negara	23.966.676	23.797.612	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.132.600	4.600.000
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,250,000	270,000	III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
8	Pengadaan Mebel	101.786.630	86.009.000	8	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	79.794.725	53.951.754
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.300.348	17.785.845	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.776.380	29.745.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.907.400	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.167.776	23.135.812	IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.199.390	42.284.570 45,000,000	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	14.256.200
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.994.922	69.314.225	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000	2.100.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.988.952	47.807.232	V	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.344.760	8.260.398
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.977.905	8.156.200
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.567.500	62.090.336	B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20600.000	14.450.000	VI	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		

disdikkerind



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2021		No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.625.000	41.266.000	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	299.629.700	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.948.000	9.177.500		JUMLAH	664.845.680	521.836.130
	JUMLAH	737.199.344	628.033.932				

disnakerind

Tabel 3.56

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan (%)
BELANJA		11.327.431.259,98	8.214.671.639,00	72,52
1.	Belanja Pegawai	5.430.499.632	6.053.911.310,00	111,48
2.	Belanja Barang/ Jasa	3.823.414.324,98	2.038.412.888,00	53,31
3.	Belanja Hibah	343.158.975	19.230.000,00	5,60
4.	Belanja Modal	1.730.358.328	103.117.441,00	5,96

Dari tabel diatas dikatakan bahwa realisasi belanja tahun 2022 hampir semua belanja mengalami penurunan hal ini dikarenakan, hal ini memang anggaran yang diberikan pada belanja-belanja tersebut tidak besar dikarenakan kemampuan keuangan daerah terbatas. Dimana anggaran Tahun 2022 hanya sebesar Rp. 10.290.439.542,- lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 15.394.743.445 yang mana realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 8.317.591.389,- atau 80,83%, sedangkan tahun 2021 teralisasi sebesar Rp. 11.327.433.961,18,- atau sebesar 73,58%.

disnakerind

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Se jauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAPKIN ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 5 (lima) sasaran dalam tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai 100%, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,12%	70,92%	99,72%
2	Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	5,5%	95,83%	1742%
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	40%	40%	100%



No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,57%	12,60%	80,92%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Memuaskan	100%

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Tahun 2022, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Bidang Ketenagakerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenagakerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.

2. Bidang Perindustrian

a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah dengan pembangunan Rumah Kemasan.

b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaannya.

3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

1. Penguatan kelembagaan dan personil
2. Membangun jaringan kerja
3. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaihari, Februari 2023

Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian

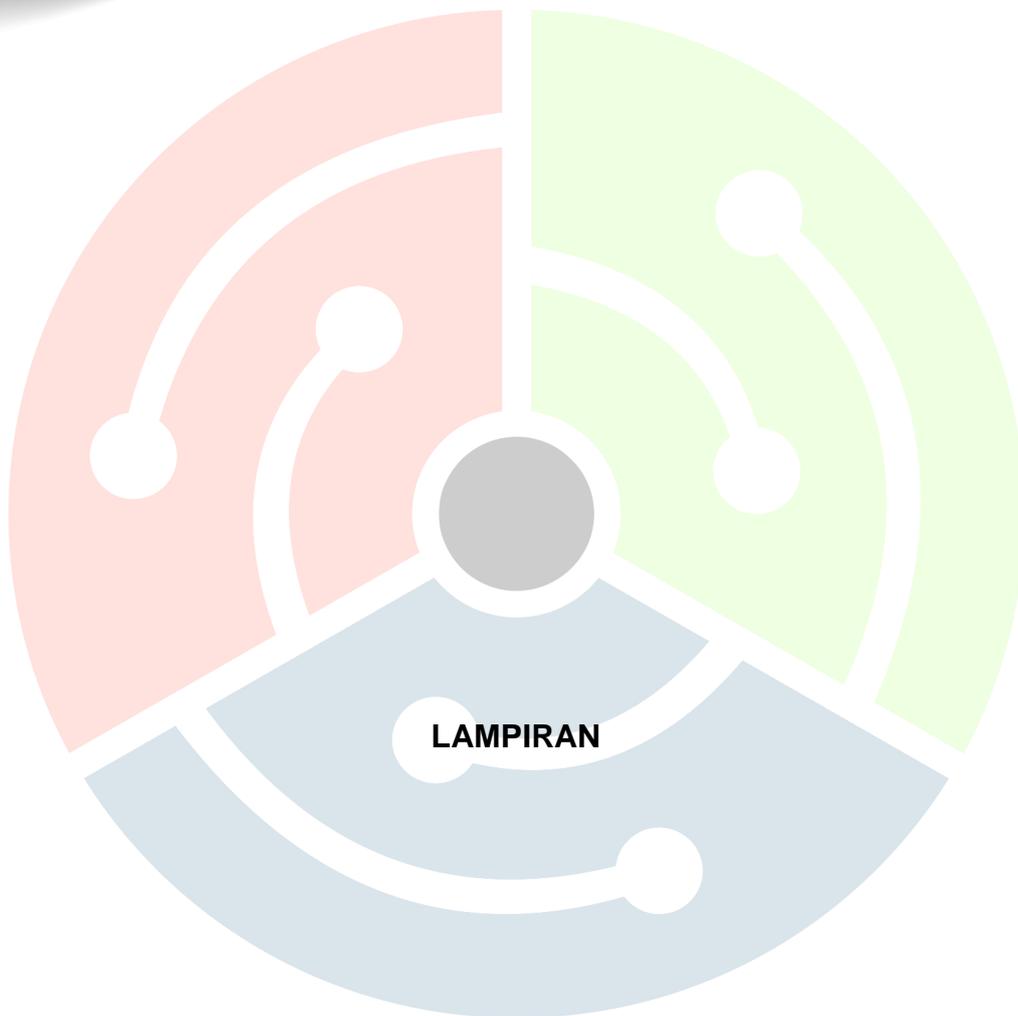
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

disnakerind



disnakerind

